KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh:

MASLAHATUL HABIBAH TAMI NIM. 101214002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPE SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU POLITIK JULI 2018

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Maslahatul Habibah Tami

NIM

: I01214002

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul

:KEBIJAKAN **PEMERINTAH TENTANG**

PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.

2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.

3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

> Surabaya, 10 Juli 2018 Yang menyatakan

Maslahatul Habibah Tami NIM I01214002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh

Nama

: Maslahatul Habibah Tami

NIM

: I01214002

Program Studi

: Ilmu Politik

yang

berjudul:

KEBIJAKAN

PEMERINTAH

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa

Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), saya berpendapat

bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka

memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik

Surabaya, 19 Juli 2018

Pembimbing

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si

NIP: 197202062007101003

PENGESAHAN

Skripsi oleh Maslahatul Habibah Tami dengan judul KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Juli 2018.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

<u>Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.</u> NIP. 197202062007101003

Penguji III

<u>Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.</u> NIP. 19690971994032001 Penguji II

Andi Suwarko, S.Ag., M.Si. NIP. 197411102003121004

Penguji IV

Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si. NIP. 197704182011011007

Surabaya, 25 Juli 2018

Mengesahkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA., M.Ag., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

ocoagai sivitas aixa	dennika O114 Buhan 13111per Burabaya, yang bertanda tangan di bawan ini, saya.
Nama	: Maslahatul Habibah Tami
NIM	: I01214002
Fakultas/Jurusan	: FISIP/Ilmu Politik
E-mail address	: maslahatulhabibahtami60@gmail.com
UIN Sunan Ampe Sekripsi — yang berjudul : KEBIJAKAN PE Implementasi Pro	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () MERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studiogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa matan Panceng Kabupaten Gresik)
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	nan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

Maslahatul Habibah Tami

ABSTRAK

Maslahatul, 2018 KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan, PNPM Mandiri Pedesaan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan: 1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. 2. Mengetahui Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Penelitian dilakukan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *trianggulasi sumber* yang berarti peneliti akan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Teori yang digunakan adalah: 1. Teori Kebijakan dari Riant (ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses). 2. Teori Implementasi dari Merile S. Grindle (isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan) mengenai partisipasi masyarakat 3. Teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Uphoff, Cohen, dan Goldsmith: (perencanaan, pelaksanan, menikmati hasil atau pemanfaatan dan evaluasi).

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. Impelementasi PNPM MP di Desa Banyutengah telah berhasil karena melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan dari PNPM itu sendiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Banyutengah terbukti terlaksana dengan baik. Masyarakat Desa Banyutengah secara aktif ikut terlibat dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, menikmati hasil dan Proses Evaluasi. Maka terlihat bahwa PNPM memiliki nilai plus dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat Desa Banyutengah dapat dikatakan bahwa partisipasinya tergolong Partisipasi Mandiri. 2. Dampak PNPM MP pada masyarakat desa banyutengah jika dilihat dari segi Sosial-Ekonomi adalah: Ekonomi: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pergerakan pada angka Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa, peningkatan penghasilan perbulan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM MP, dengan melihat usaha-usaha kecil masyarakat Desa Banyutengah dari penjual es tebu, berdagang kambing, berdagang krudung, modal pertanian dan untuk modal usaha lainya. Sosial: memberdayakan masyarakat dengan cara mendorong partisipasi masyarakat untuk bergotong royong, menggali kreatifitas masyarakat dan lain-lain.

ABSTRACT

Maslahatul, 2018 GOVERNMENT POLICY CONCERNING POVERTY REDUCTION (Study on the Implementation of the National Independent Community Empowerment Program in the Banyutengah Village, Panceng District, Gresik Regency)

Keywords: Government Policy, Poverty Reduction, Rural PNPM Mandiri

The purpose of this study was to describe: 1. Implementation of the National Independent Community Empowerment Program in the Village of Banyutengah, Panceng District, Gresik Regency. 2. Knowing the Impact of the National Independent Community Empowerment Program in Tackling Poverty in the Banyutengah Village, Panceng District, Gresik Regency.

The study was conducted using descriptive qualitative methods. Data validity checking technique uses source triangulation technique which means the researcher will compare and check the degree of confidence of information obtained through different time and tools in qualitative methods.

The theories used are: 1. Riant's Policy Theory (policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy and process accuracy). 2. The Implementation Theory of Merile S. Grindle (policy content, and policy environment) regarding community participation 3. The theory of community participation proposed by Uphoff, Cohen, and Goldsmith: (planning, implementing, enjoying results or utilization and evaluation).

The results of the study stated that: 1. Implementation of the National Independent Community Empowerment Program in the Village of Banyutengah was successful because it saw the suitability of the implementation or implementation of policies with the design, goals and policy objectives of PNPM itself. The National Program for the Empowerment of Rural Independent Communities in Banyutengah Village proved to be well implemented. The Banyutengah Village Community is actively involved in the Planning, Implementation, enjoying the results and the Evaluation Process. So it can be seen that the National Independent Community Empowerment Program has a plus in community empowerment, the people of Banyutengah Village can be said that their participation is classified as Independent Participation. 2. Impact of the National Independent Community Empowerment Program on the rural community of Banyutengah if viewed from the Socio-Economic perspective are: Economy: Improving community welfare, Movement on Unemployment rates in Banyutengah Village communities, providing employment opportunities for rural communities, increasing monthly income between before and after the National Independent Rural Community Empowerment Program, by looking at the small businesses of the Banyutengah Village community from sugar cane sellers, trading goats, trading in veils, agricultural capital and other business capital. Social: empowering people by encouraging community participation to work together, exploring community creativity and others.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi konseptual	8
F. Penelitian terdahulu	23
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II : KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PNPM MP	33
A. Teori kebijakan publik	33
B. Teori implementasi kebijakan	35
C. Teori partisipasi masyarakat	41
BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Pemilihan Subyek dan Obyek Penelitian	49
D. Tahap-Tahap Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Penentuan Informan	59
G. Teknik Analisis Data	60
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	61
I. Jadwal Penelitian	67
i. Judwai i chentuan	07
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN	
PNPM MP	68
A. Gambaran Umum Lokasi Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	68
B. Implementasi kebijakan PNPM MP di Desa Banyutengah	
C. Dampak kebijakan PNPM MP terhadap masyarakat	. 05
Desa Banyutengah	123
BAB V : PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	138
DAFTAR PIISTAKA	120

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah penting bagi indonesia, sehingga hal itu menjadi fokus perhatian bagi pemerintah indonesia. Banyak ditemukan kasus kemiskinan dan pengangguran diberbagai wilayah indonesia, kemiskinan membuat jutaan anak tidak bisa merasakan bangku pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, maka tidak heran jika hal itulah yang memicu terjadinya kejahatan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya menjadi masalah yang fenomenal diseluruh belahan dunia, terutama bagi negara-negara berkembang seperti indonesia. Masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada disuatu negara memang harus dilihat secara menyeluruh dan mendalam agar tercipta pemecahan masalah yang tepat. Kemiskinan dan pengangguran memang saling berkaitan satu sama lain, persoalan kemiskinan itu lebih dipicu karna banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, hal itulah yang membuat masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhanya dan angka kemiskinan selalu ada.

Kemiskinan tidak mudah diberantas begitu saja, keduanya masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Hal itu diperkuat oleh angka statistik yang menunjukan bahwa masih banyaknya angka kemiskinan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.405,27 ribu jiwa (11,20 persen), berkurang sebesar

211,74 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 4.617,01 ribu jiwa (11,77 persen). Jika dilihat dari hasil survey diatas memang terjadi pengurangan angka kemiskinan, namun hal itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan karna memang kemiskinan sering kali naik turun, maka pemerintah mencoba membuat suatu kebijakan serius untuk memihak pada masyarakat miskin guna mengurangi angka kemiskinan pada wilayah indonesia. Namun kebijakan yang dibuat selama ini seringkali tidak sesuai dan kurang memihak pada masyarakat miskin, sehingga semakin memperburuk kondisi masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks memang seharusnya membutuhkan campur tangan dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganan selama ini cenderung kurang dan tidak berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perubahan yang sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah². Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya-

-

¹ https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/600/profil-kemiskinan-di-jawa-timur-september-2017.html diakses pada tanggal 04/01/2018 pada jam 06:47

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahanya*, cetakan kedua (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 307.

upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selama ini banyak program dari pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat, seperti : pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, Kompensasi BBM, dan lain-lain. Namun, dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta dinilai kurang efektif, karena masyarakat hanya menerima bantuan langsung dan tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya kurang makan, kurang pendapatan,kurang sehat dan kurang dinamis) dan obyek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang dikembangkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk masyarakat miskin perkotaan dan juga

perdesaan yang telah dilaksanakan hampir pada seluruh wilayah Indonesia yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Mulai tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.³

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung di dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa Pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan meningkatkan

_

³ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *PTO* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*),hal 5

lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.⁴

Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan salah satu target sasaran pemerintah untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik pada masyarakatnya. Namun Desa Banyutengah baru mulai mendapatkan bantuan pinjaman dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM) Mandiri sejak tahun 2009.

Desa Banyutengah, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk di dalam PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri, salah satunya adalah program PNPM Mandiri Perdesaan yang bernama Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang ada di Desa tersebut. Dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian negara.

Namun dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara umum, masalah yang sering terjadi yang menyebabkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tidak berjalan dengan baik yakni, adanya

_

⁴ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *PTO* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*),hal 10

keterlambatan dalam pengembalian dana pinjaman atau pinjaman bergulir, selain itu peran aktif masyarakat juga memperngaruhi kesuksesan pada program pemerintah ini, jika masyarakatnya tidak mau tahu tentang program tersebut maka akan sangat mudah dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan begitu, dana yang disalurkan oleh pemerintah tidak akan sesuai sasaran, dan hal itu akan menjadikan masyarakat lebih menderita karna akan terdaji ketimpangan sosial yang nyata, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Hal ini menunjukan pada proses PNPM MP dinilai belum efektif, dengan masalah yang ada diatas penulis tertarik untuk mengamati kebijakan pemerintah melalui PNPM MP yang ada di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan melihat implementasi program yang ada di desa tersebut, serta ingin mengetahui dampak dari PNPM MP. Maka tema yang menjadi landasan penulis untuk penelitian kali ini adalah: "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka, rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
- 2) Bagaimana Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui Implementasi Program Nasional Pemberdayaan
 Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan
 Panceng Kabupaten Gresik.
- 2) Mengetahui Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan, Sebagai acuan dan tambahan referensi untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya tentang kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, agar kebijakan tersebut lebih efektif dan efisien untuk diterapkan dan dilaksanakan.

3) Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya kepada mahasiswa Prodi Ilmu Politik dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khasanah intelektual, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembelajaran di penelitian-penelitian berikutnya.

E. Definisi Konseptual

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh sebagai faktor yang saling berkaitan dengan tingkat pendapatan, kesehatan, akses, terhadap barang dan jasa, kreasi dan gender serta kondisi lingkungan. Dalam hal ini kalau melihat strategi nasional penanggulangan kemiskinan didefinisikan, kemiskinan tersebut adalah yang diakbitkan oleh ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Kemiskinan tidak lagi mempengaruhi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetap juga kegagalan

memenuhi hak-hak dasar dan perbudakan, perlakuan seseorang atau sekelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Artinya, masalah kemiskinan dilihat bahwa kebutuhan masyarakat itu bermacam-macam sehingga masalah kemiskinan manusia dipandang dan berbagi segi. Menurut Smeru dalam Soeharto (2005) menyatakan dimensi kemiskinan sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, pant bersih dan transportasi).
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Ketidakterlibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

 Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).⁵

2. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab ⁶adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement Dalam kamus besar webster. implement to (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

⁵ Litaniawan Fedrik, Suasa "*Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kecamatan Torue Kabupatenparigi Moutong*" Jurnal Academica Fisip Untad Vol.06 No. 01 Februari 2014

⁶ Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, edisi kedua. (jakarta:PT Bumi aksara, 2008) hal, 187

11

Mazmanian dan Sebastiar⁷ juga mendefinisikan implementasi

sebagai berikut: "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan".

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan

pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga

berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau

seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini

berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti

tahapan peng<mark>es</mark>ahan undang-undang, kemudian output kebijakan

dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai

perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar

sebuah kebijakan dapat mencapai sebuah tujuan. Tidak lebih dan

tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada

dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

⁷ Abdul, Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.*

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal,68

Rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program, ke proyek, dan kegiatan⁸

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2kP). keberhasilan PPk dan P2kP menjadi model pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan di lokasi PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri dimaksudkan untuk menjadi payung program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Presiden RI, susilo Bambang Yudhoyono di Palu, sulawesi tengah pada 30 april 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2015 dan sejalan dengan target pencapaian Mdgs (Millennium development goals). diharapkan, dalam rentang waktu

⁸Riant Nugroho, *Public Policy Teori kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijkan* (Jakarta:PT GRAMEDIA,2008) hal 674

⁹ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *PTO* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*),hal 5

2007–2015, kemandirian dan keberdayaan masyarakat telah terbentuk sehingga keberlanjutan program dapat terwujud.

Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan cara menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat-baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri.¹⁰

a. Prins<mark>ip-Prinsip Dasa</mark>r PNPM Mandiri

- Bertumpu pada Pembangunan Manusia Pelaksanaan
 PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan
 harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- Otonomi Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- 3) Desentralisasi Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan

¹⁰ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dam Desa, *PTO* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*), hal 5

- kepada Pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- 4) Berorientasi pada Masyarakat Miskin Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.¹¹
- 5) Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
- 6) Kesetaraan dan Keadilan Gender Laki-laki dan perempuan Mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- 7) Demokrasi Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- 8) *Transparansi dan Akuntabel* Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka

.

¹¹ Ibid hal 06

- dan dipertanggungjawabkan-baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- 9) Prioritas Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
- 10) Kolaborasi Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.
- 11) Keberlanjutan Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- 12) *Sederhana* Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.¹²

.

¹² Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *PTO* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*),hal 6

b. Komponen Kegiatan dalam PNPM Mandiri

Komponen Kegiatan dalam PNPM Mandiri merupakan unsur utama yang harus ada di dalam setiap program PNPM Mandiri. komponen-komponen tersebut adalah:

- Pengembangan Masyarakat: Serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasi.
- 2) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM): Berbentuk dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
- 3) Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal:

 Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas
 pemerintah daerah dan pelaku lokal atau pemangku
 kepentingan lainnya agar mampu menciptakan kondisi
 yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat
 terutama kelompok miskin dalam menjalani
 kehidupannya secara layak. kegiatan terkait dalam

komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. 13

c. Ruan<mark>g L</mark>ingku<mark>p Kegia</mark>tan PNPM Mandiri

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat. kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa:

- Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi melalui kegiatan padat karya;
- Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

.

¹³ Ibid hal 10

- 3) Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini
- 4) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercapat perncapaian target
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

d. Sasaran PNPM Mandiri Pedesaan

Lokasi sasaran: meliputi seluruh kecamataan pedesaan di indonesia yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kategori kecamatan yang bermasalah dalam PPK/PNPM MP. Kelompok sasaran: Masyarakat miskin di pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan, kelembagaan pemerintahan lokal.¹⁴

e. Pendanaan

PNPM Mandiri sebagai program bersama antara pusat dan daerah didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) dan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi atau kabupten/kota. PNPM Mandiri juga membuka peluang dukungan atau pendanaan

¹⁴ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PTO (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan),hal 7

dari sektor swasta, swadaya masyarakat dan berbagai lembaga. dalam mengkoordinasikan dukungan hibah dari berbagai donor, pada tahun 2007 dibentuk fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PNPM Support Facilicty atau Psf) yang diketuai oleh deputi Bidang kemiskinan, ketenagakerjaan dan UKM Bappenas. dukungan yang diberikan Psf kepada pemerintah berupa dukungan teknis yang terkait dengan perencanaan, kebijakan, managemen pengelolaan dan perencanaan keuangan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Sumber Pendanaan PNPM Mandiri berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 3) Swadaya Masyarakat
- 4) Partisipasi Dunia Usaha¹⁵

f. Kriteria alokasi

Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin¹⁶.

g. Pencairan Dana PNPM Mandiri

_

¹⁵Ibid *hal 7*

¹⁶ Ibid hal 8

Mekanisme pencairan dana BLM dari kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) atau kas daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut:

- Pencairan dana yang berasal dari pemerintahan pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah
- 3) Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Depdagri
- 4) Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hail pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan.
- 5) Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN
- 6) Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk paak, retribusi atau biaya lainya.¹⁷

h. Pemantauan dan Pengawasan

_

¹⁷ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *PTO* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*),hal 8

Pemantauan dan pengawasan PNPM Mandiri dilakukan untuk menjadi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program. PNPM Mandiri menerapkan sistim pemantauan dan pengawasan sebagai berikut:

- Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat. mulai dari perencanaan partisipatif hingga pelaksanaan PNPM Mandiri di tingkat desa sampai kabupaten atau kota.
- 2) Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah.

 Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku serta dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program
- 3) Pemantauan dan Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan secara dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistim informasi pengendalian program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan

melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat segera dilaksanakan.

- 4) Pemantauan Independen oleh Berbagai Pihak Lainnya PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak lain, seperti LsM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada instansi terkait yang berwenang.
- 5) Kajian Keuangan dan Audit. Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat kabupaten/kota sebagai lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu digunakan sebagai bahan kajian dan masukan bagi penulis, sehingga diharapkan dengan hasil-hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut

.

¹⁸ Ibid. hal 45

sebagai tolok ukur atas hasil berkelanjuatan yang telah dicapai.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) antara lain:

1. Wismoyo Ade Zaputro, Dengan Judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang" dalam penelitianya bertujuan untuk mengetahui makna pemberdayaan, mengetahui tahapan implementasi kebijakan PNPM mandiri perdesaan, dan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan program PNPM mandiri perdesaan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecaamatan Lembang Kabupaten Pinrang yaitu tahap pertama, pemberian sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat kecamatan,desa dan khusus perempuan. Tahap kedua, Perencanaan dan penetapan prioritas usulan sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Tahap ketiga penjaringan aspirasi masyarakat dalam mencari program yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tahap keempat yaitu proses pelaksanaan program PNPM Mandiri.

Dampak program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan sudah signifikan baik dalam

peningkatan produktivitas, pendapatan petani maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan PNPM mandiri di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menunjukkan keberhasilan dan kriteria-kriteria dengan rata-rata baik. 19

2. Hidayat, Sarif "Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)" hasil penelitian menunjukkan bahwa: Program pemerintah terkait dengan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Dlingo, sudah mempunyai efektifitas program bagi masyarakat di Desa Dlingo. Misalnya, dalam hasil temuan saya di lapangan bahwa di salah satu dusun yaitu Dusun Kebosungu I ada seorang pelopor yang bisa membangun masyarakatnya untuk bekerja sebagai karyawannya di rumah produksitas. Setelah mengikuti pelatihan menjahit yang difasilitasi oleh PNPM - MP seorang pelopor yang bernama Ibu Sukirwan memiliki inisiatif mengembangkan usaha rumah produksi tas, dan si pelopor bisa membantu masyarakat di Dusun Kebosungu I untuk bekerja sebagai karyawan pembuat tas tersebut dan sebagian besar dari masyarakat yang bekerja sebagai karyawan Ibu Sukirwan mengikuti pelatihan menjahit. Akan tetapi, keberhasilan PNPM - MP yang

.

¹⁹ Ade Zaputro, Wismoyo Skripsi "Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, SKRIPSI Jurusan, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2015

mampu memberikan inisiatif masyarakat di Dusun Kebosungu I tidak dibarengi di dusun-dusun lain.²⁰

- 3. Malik, Abdul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Penelitian Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm) Di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)" hasil penelitian menunjukkan bahwa:
 - (1) Strategi Implementasi Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Nasional (PNPM) di Kecamatan Geger adalah dengan membuat perencanaan partisipatif yang bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki -laki maupun perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara aktif dalam penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan di Pendopo Kecamatan (2) Kegiatan ini melibatkan 13 desa dengan rincian laki-laki berjumlah 52 orang, perempuan 26 orang dan RTM berjumlah 49 orang. Selain itu

-

²⁰ Hidayat, Sarif "Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Kehidupan Masyarakat(Studi Kasus Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)" SKRIPSI Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013

juga diadakan musrembang untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan, yang di hadiri oleh Camat, Perwakilan Bappeda Kabupaten Bangkalan, Muspika Kecamatan Geger serta Peserta Musrenbangcam terdiri dari delegasi desa yang terdiri dari Kades, BPD, **LPMD** dan Tokoh Perempuan, Kepala serta UPT/UPTD/Dinas terkait yang ada dilingkup Kecamatan serta semua Kasi kantor Kecamatan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Dapil Geger. (3) Kondisi SDM dalam pelaksanaan PNPM di Kecamatan Geger sangat mendukung, karena yang terlibat dalam program ini rata-rata memiliki tingkat pendidikan tinggi. merencanakan pembangunan Seperti dalam pemberdayaan selama ini yang terlibat adalah Camat, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Tim Verifikasi (TV), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal (PL), Tim Pengamat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Setrawan Kecamatan. Hal ini juga dapat dukungan dari sikap masyarakat terhadap kegiatan PNPM hal ini bisa dilihat seperti aktifnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan usaha ekonomi produktif maun kegiatan simpan pinjam perempuan yang dikuti oleh 364 orang. (4) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui PNPM di Kecamatan. Geger Kabupaten Bangkalan adalah kurangnya sosialisasi dan informasi dari Satker Kabupaten (Bapedda dan

Bapemmas) dalam rangka pelaksanaan skema integrasi Perencanaan Pembangunan Reguler dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 kepada Pelaku di tingkat Kecamatan dan Desa sehingga belum bisa terlaksana secara optimal. Selain itu berbagai program pembangunan maupun pemberdayaan belum bisa terlaksananya pelaksanaan skema integrasi Perencanaan Pembangunan Reguler dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 sekaligus rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program PNPM Mandiri.²¹

4. I Gusti Putu Putra, "Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Mas<mark>ya</mark>rakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung" hasil penelitian menunjukkan bahwa: Efektivitas PNPM di Kec. Abiansemal Kab. Badung tergolong sangat efektif sebesar 84,52 persen. Berdasarkan uji beda dua rata-rata pengamatan berpasangan pendapatan dan kesempatan kerja Rumah Tangga Sasaran menunjukan hasil yang signifikan pada alpha 5 persen. Pendapatan rata-rata per bulan sebelum program Rp.2.066.000, sesudah program Rp.2.961.000,- dan jumlah jam kerja rata-rata perhari sebelum program 5,86 jam, meningkat menjadi 8,29 jam sesudah program.²²

_

²¹ Malik, Abdul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Penelitian Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm) Di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)" SKRIPSI, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2012

²² I Gusti Putu Putra, "Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja

Darmansyah, Marco "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2014" Hasil penelitian menunjukkan bahwa : ialah pelaksanan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Senduro sejalan dengan Petunjuk Teknis Operasioanl (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif sedangkan dalam tahap pemeliharaan partisipasi masyarakat masih tergolong kurang. Dampak dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan ialah mampu mendorong Senduro kesempatan partisipasi masyarakat, memberikan kerja masyarakat desa, meningkatkan penghasilan, meningkatkkan usaha dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kendala yang dihadapi selama PNPM Mandiri Perdesaan berlangsung ialah pemotongan anggaran PNPM sebesar 11,8 % dan penyaluran dana yang sempat terhenti sehingga berimbas pada kualitas hasil kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan dan berkurangnya jumlah pekerja akibat keterlambatan penyaluran dana PNPM.²³ Berikut tabel yang dapat mempermudah pembaca dalam menemukan perbedaan dan pesamaan antara penelitian satu dengan lainya.

5.

Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung "TESIS, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015

²³ Darmansyah, Marco "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2014"SKRIPSI Jurusan PEMBANGUNAN WILAYAH, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017

Wismoyo Ade Zaputro, Dengan	1. Mengetahui makna
Judul Skripsi "Implementasi	pemberdayaan
Kebijakan Program Nasional	2. Mengetahui tahapan
Pemberdayaan Masyarakat	implementasi kebijakan PNM
(PNPM) Mandiri Dalam	MP
Pengentasan Kemiskinan Di	3. Mengetahui dampak ekonomi
Kecamatan Lembang Kabupaten	masyarakat
Pinrang"	
Hidayat, Sarif "Dampak Sosial	1. Mengetahui dampak sosial-
Ekonomi Program Nasional	ekonomi masyarakat
Pemberdayaan Masyar <mark>aka</mark> t Man <mark>di</mark> ri	
Perdesaan (Pnpm-Mp) Te <mark>rhada</mark> p	
Kehidupan Masyara <mark>kat (Stud</mark> i	
Kasus Desa Dlingo, Kecamatan	
Dlingo, Kabupaten Bantul,	
Yogyakarta)"	
Malik, Abdul "Implementasi	1. Mengetahui strategi
Kebijakan Pemerintah Daerah	implementasi kebijakan dalam
Dalam Pengentasan Kemiskinan	pengentasan kemiskinan
(Studi Penelitian Pada Pelaksanaan	2. Kegiatan melibatkan 13 desa
Program Nasional Pemberdayaan	3. Kondisi SDM yang terlibat
Masyarakat Mandiri (Pnpm) Di	rata-rata memiliki tingkat
Kecamatan Geger Kabupaten	pendidikan yang tinggi

Bangkalan)"	4. Diikuti oleh 364 orang simpan
	pinjam perempuan.
I Gusti Putu Putra, "Efektivitas Dan	1. Mengetahui Efektivitas
Dampak Program Nasional	terhadap peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	kesejahteraan
Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap	2. Menunjukan pendapatan
Peningkatan Kesejahteraan Dan	sebelum dan sesudah program
Kesempatan Kerja Rumah Tangga	
Sasaran Di Kecamatan Abiansemal	
Kabupaten Badung''	
Darmansyah, Marco "Implementasi	1. Penelitian menunjukan dampak
Program Nasional Pemberdayaan	pada tahun 2014
Masyarakat (Pnpm) Mandiri	
Perdesaan Di Kecamatan Senduro	
Kabupaten Lumajang Tahun 2014"	

Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian dengan tema "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)" Tema tersebut akan peneliti fokuskan pada: 1. Dampak Sosial Ekonomi kebijakan pemerintah apakah memang sudah sejalan dengan petunjuk teknis operasional PNPM MP. 2. Penelitian akan dilakukan dari periode awal desa

tersebut menjadi sasaran kebijakan pemerintah pada tahun 2009 hingga 2015 sehingga dapat mengetahui tingkat efektivitas program tersebut dari tahun-ketahun. 3. Mengetahui partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah. 4. Kegiatan penelitian hanya akan melibatkan 1 Desa. 5. Kondisi masyarakat desa Banyutengah yang terlibat rata-rata berpendidikan SD sederajat yang masih tergolong menengah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari ketidak beraturan pembahasan dalam laporan penelitian ini, dan demi fokusnya pemikiran serta pemecahan pokok permasalahan agar lebih teratur, hasil penelitian disusun dalam suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan sub bab yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain untuk memudahkan penulisan serta memudahkan pembaca untuk memahami secara runtut.

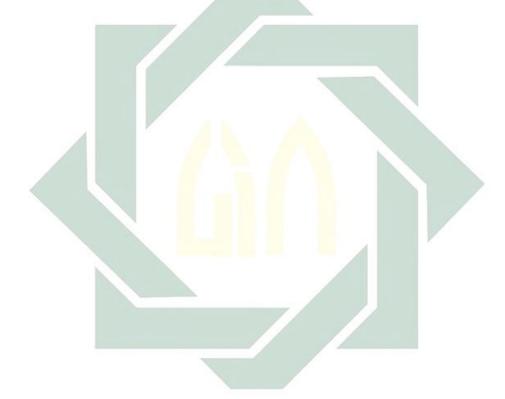
BAB I: Pendahuluan, merupakan gambaran umum dan pengantar pembahasan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teoritik, dalam bab ini terdiri atas Definisi konseptual, penelitian terdahulu, kajian Pustaka, kerangka teori yang akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III: Metodelogi Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data

BAB IV: Penyajian dan Analisis Data, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V : Bab Penutup, meliputi kesimpulan dan rekomendasi atau saran.



BAB II

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PNPM MP

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, *kebijakan* adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi politik dan ungsi administrasi. Fungsi politik terkait dengan pembuatan kebijakan sedangkan fungsi administrasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan konsep ini kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik, sedangkan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut berada pada wilayah administrasi pemerintahan²⁴

Pengertian Kebijakan yang dikemukakan oleh salah satu ahli *Menurut Mustopadidjaja*: Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau

33

²⁴ M Ubaidillah, Hasan, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014) Hal 169

untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.²⁵

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Riant²⁶ mengemukakan bahwa terdapat lima "tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

- a. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Tepat pelaksananya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

²⁵ http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html4 diakses pada 24 Nov 2017, jam 08.23

²⁶ Nugroho, Riant. *Public Policy*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2012.) hal 707

- c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak, dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses, yaitu Policy Acceptance, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan

2. Teori Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai

contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran²⁷

Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *konsep* implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan

²⁷ Grindle, Merilee S, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World,* (new jersey: Princetown University Press, 1980) hal 7

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²⁸

A. Analisis kebijakan

Analisis mengandung tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses kebijakan., analisis dimaksudkan untuk meningkatkan metode untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan, menentukan tujun, mengevaluasi alternatif pilihan, memilih alternatif dan mengukur kinerja. Menurut Gordon *Et Al.a*²⁹ analisis kebijakan mencakup:

- a. *Determinasi Kebijakan*: Analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat.
- b. *Isi kebijakan*: mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubunganya dengan kebijakan sebelumnya, atau analisis ini bisa juga didasari oleh informasi yang disediakanoleh kerangka nilai/teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan.
- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan : fokus analisis ini adalah mengkaji bagaimana kinerja kebijakan dengan

-

²⁸ Ade Zaputro, Wismoyo skripsi "Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang hal, 14

²⁹ Parsons wayne *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (jakarta:Prenadamedia Grup, 2005) hal, 56

- mempertimbangkan tujuan kebijakan, dan apa dampak kebijakan terhadap suatu persoalan tertentu.
- d. Advokasi kebijakan : berupa riset dari argumen yang dimaksudkan untuk mempengaruhi agenda kebijakan di dalam atau di luar pemerintahan.
- e. *Informasi untuk kebijakan*: analisis ini dimaksudkan untuk memberi informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan. Ini bisa berbentuk anjuran atau riset ekstenal/internal yang terperinci tentang aspek kualitatif dan judgemental dari suatu kebijakan.

Salah satu kontribusi terpenting untuk analisis pengambilan keputusan diberikan oleh Graham Allison³⁰ dalam studinya tentang *krisis misil kuba pada 1962: the essence of decision 1971* ia mencoba menunjukkan bagaimana "lensa"/sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan intrepetasi yang berbeda pula pada suatu peristiwa. Dia memandang krisis itu melalui tiga model sudut pandang:

- a. Aktor rasional: memfokuskan pada pengambilan keputusan oleh "pemerintah nasional" dalam hal tujuan, opsi, konsekuensi dan pilihan.
- b. Proses organisasional: memfokuskan pada organisasi yang menjadi bagian dari pemerintah nasional dan bagaimana organisasi itu memahami dan meghadapi persoalan tersebut.

٠

³⁰ Ibid, hal 63

c. Politik birokratis: memfokuskan pada pemerintahan nasional yang terdiri dari para pemain yang memiliki tujuan, kepentingan dan pandangan. Pengambilan keputusan dibingkai dalam kerangka relasi kekuasaan dan dalam proses tawar-menawar yang terjadi. Graham Allison memberikan tiga cara melihat krisis dimana masing-masing paradigma menghasilkan versi yang berbeda dalam memahami mengapa peristiwa itu terjadi. Lensa itu memberikan lebih dari sekedar "sudut pandang sederhana."

B. Evaluasi Kebijakan

Thomas Dye mendefinisikan evaluasi kebijakan adalah³¹: pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Carol Weiss mengatakan bahwa evaluasi dibedakan dari bentuk-bentuk analisisi lainya berdasarkan enam hal:

- Evaluasi dimaksudkan untuk pembuatan keputusan, dan untuk menganalisis problem seperti yang didefinisikan oleh pemuat keputusan, bukan oleh peneliti.
- Evaluasi adalah penilaian karakter, riset bertujuan untuk mengevaluasi tujuan program.
- Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam setting kebijakan, bukan dalam setting akademik.

³¹ Ibid hal, 547

- 4) Evaluasi seringkali melibatkan konflik antara periset dan praktisi
- 5) Evaluasi biayanya tidak dipublikasikan
- 6) Evaluasi mungkin melibatkan periset dalam persoalan kesetiaan kepada agen pemberi dana dan peningkatan perubahan sosial.

C. Dampak Kebijakan

Untuk menjawab pertanyaan mengenai apa efek dari kebijakan, kita memerlukan jawaban yang komplek, seperti didefinisikan oleh freeman³²: penilaian dan rossi atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi akan menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi h<mark>an</mark>ya beberap<mark>a j</mark>awaban yang mungkin masuk akal, tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan "efek bersih" dari sebuah intervensi- yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oeleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi prilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sudah dievaluasi itu. Metodenya antara lain:

- Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- 2) Melakukan eksperimen untuk menguji dampak sustu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkanya dengan apa yang terjadi diarea atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.

٠

³² Ibid hal. 604

- Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi
- 4) Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu
- 5) Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebiakan dan program
- 6) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan
- 7) Menggunakan ukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

3. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara harfiah berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan" secara luar partisipasi dapat diartikan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela pada semua proses kegiatan yang bersangkutan" Partisipasi merupakan kunci demokrasi yang paling pokok yaitu bagaimana upaya meningkatkan partisipasi dalam pembentukan nilai-nilai yang akan mengatur mereka. Asumsinya semakin tinggi peran serta masyarakat dalam proses kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, semakin baik tingkat kualitas kebijakan tersebut.³³

Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik (Kaid & Halt-Bach 2008) partisipasi masyarakat yang ada disuatu negara kan menentukan kualitas

³³ Abas, Dr *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal* (Depok:Alta Utama, 2017) hal 123

demokrasi negara tersebut. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa adanya aktivitas yang dilakukan warga negara dalam partisipasi politik, semakin banyak warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses politik, semakin berkualitas pula negara tersebut.³⁴

Teori yang dikemukakan oleh Uphoff, Cohen, dan Goldsmith, menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith, partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. partisipasi masyarakat dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanan, menikmati hasil atau pemanfaatan dan evaluasi. Partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, serta dalam evaluasi pelaksanaan program³⁵. Tingkatan Partisipasi Menurut Prety, J., 1995, ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu:

1) Partisipasi pasif atau manipulatif.

Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah

³⁴ Subiakto Henry, *Komunikasi Politik-Media dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2014) hal 72

³⁵ S. Nasution, sosiologi pendidikan (jakarta:Bumi Aksara,2010) hal, 16

terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.

2) Partisipasi informative

Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaanpertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akyurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.

3) Partisipasi konsultatif

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4) Partisipasi insentif

Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

5) Partisipasi fungsional

Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.

6) Partisipasi interaktif

Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragama perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7) Mandiri (self mobilization)

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan yang terpenting, masyarakat juga memegang kandali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.³⁶

-

³⁶ Sugandi, Yogi Suprayogi, *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011) Hal 184

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat people centred, participatory, empowering, andsustainable". Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana yang membuat potensi masyarakat berkembang. ke dua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dalam hal ini melakukan langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan masyarakat amat erat kaitanya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Ke tiga, memberdayakan mengandung arti melindungi, namun tidak membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program yang diberikan karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan dari usahanya sendiri. Dengan demikian usaha akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemanpuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.³⁷

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar untuk memperbaiki kehidupanya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan kata lain

-

³⁷ Sugandi, Yogi Suprayogi, *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011) Hal 181

pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari "rekayasa" pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Kelsey dan Hearne menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan adalah: bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (helping people to help them-selves)³⁸. Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa:

- Fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukanya bekerja untuk masyarakat, mereka diharuskan mapu menumbuhkan, menggerakan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
- 2) Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mendorong kreativitas dan kemandirian masyarakat.
- 3) Pemberdayaan yang dilakukan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.³⁹

Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat Partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Verhangen⁴⁰ menyatakan bahwa: partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung

³⁸ Mardikanto totok, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik Edisi Revisi,* (Bandung:ALFABETA, 2017) hal, 100

³⁹ Ibid, hal 101

⁴⁰ Ibid. hal 81

jawab dan manfaat. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:⁴¹

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lainya
- 4) Menggerakan sumberdaya masyarakat
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

_

⁴¹ Ibid, hal 84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, hubungan antar variable yang timbul, adanya fakta serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. (data yang tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berupa uraian kata) Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan berasal dari kasus lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.

⁴² Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995),hal 27

⁴³ Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian adalah Pertama: Desa Banyutengah merupakan salah satu penerima program PNPM Mandiri Perdesaan, kedua: Masyarakat di desa banyutengah berperan dalam PNPM Mandiri Pedesaan ketiga: Desa Banyutengah memiliki perekonomian warga yang bermacam-macam, hal itu dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan masing-masing, masyarakatnya rata-rata bermata pencaharian sebagai: Petani, Guru Swasta, Tenaga Kerja Indonesia. Maka peneliti tertarik pada desa Banyutengah sebagai lokasi penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada April 2018 sampai dengan Juni 2018.

3. Pemilihan Informan dan Pemilihan Obyek Penelitian

a. Informan

Informan penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 44 Dengan demikian, informan penelitian ialah sumber informasi dan data serta masukan-masukan dalam menjawab masalah penelitian. Maka informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan program inrastruktur desa dan masyarakat yang tergabung dalam

_

⁴⁴ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1988), hal.135.

kelompok Simpan Pinjam Perempuan SPP program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

b. Obyek Penelitian

Adapun objek penelitian ini meliputi:

- Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan Desa
 Banyutengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik
- 2) Dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Perekonomian masyarakat Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik

4. Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Pralapangan

Menyusun rancangan penelitian

Rancangan suatu penelitian kualitatif/usulan penelitian berisi: 1. Latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, 2. Kajian kepustakaan yang menghasilkan pokokpokok, 3. Pemilihan lapangan penelitian, 4. Penentuan jadwal penelitian, 5. Pemilihan alat penelitian, 6. Rancangan pengumpulan data, 7. Rancangan prosedur analisis data, 8. rancangan perlengkaan yang diperlukan dalam penelitian, 9. rancangan pengecekan kebenaran data.⁴⁵

Memilih lapangan Penelitian

⁴⁵ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja, 2006), hal 86

Banyak hal yang perlu dipertimbangan dalam proses memilih lapangan penelitian, seperti halnya keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga ketika melakukan penelitian di Desa Banyutengah.⁴⁶

Menjajagi dan melihat keadaan lapangan

Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam pada wilayah Desa Banyutengah untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta mempersiapkan yang diperlukan.⁴⁷

Memilih dan me<mark>ma</mark>nfaatkan i<mark>nf</mark>orman

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan informan sebagai orang untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. ⁴⁸

Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti tidak hanya mempersiapkan perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Seperti : alat tulis (pensil, ballpoint, kertas, buku catatan, map, klip, dan lain-lain. Kemudian diperlukan pula

⁴⁶ Ibid, hal 86

⁴⁷ Ibid, hal 88

⁴⁸ Ibid. hal 90

alat perekam seperti tape recorder, dan kamera foto.

Persiapan penelitian lainya yaitu : jadwal yang mencakup waktu kegiatan dan pada tahap analisis data diperlukan perlengkapan berupa laptop, map, dll⁴⁹

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian:

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Diperlukan strategi berperan sertanya peneliti dalam latar terbuka dan latar tertutup, yang dikatakan latar terbuka yakni ketika peneliti berada dilapangan umum seperti toko, taman, warung, dll. pada latar belakang demikian peneliti hanya akan mengandalkan pengamatan dan kurang sekali mengadakan wawancara. Hal itu membawa peneliti memperhitungkan latar tersebut sehingga strategi pengumpulan datanya menjadi efektif. Sebaliknya pada latar tertutup hubungan peneliti perlu akrab karena latar demikian bercirikan orang-rang sebagai subjeknya yang perlu diamati secara teliti dan wawancara mendalam.

2) Memasuki lapangan

Diperlukan (a) keakraban hubungan antara peneliti dan informan yang sudah melebur sehingga seolah-olah sudah tidak ada dinding pemisah diantara keduanya, sehingga

٠

⁴⁹ Ibid, hal 91

informan akan sukarela menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. (b) Mempelajari bahasa kegiatan ini mau tidak mau harus dilakukan oleh peneliti karena sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. peneliti akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Desa Banyutengah (c) Peranan peneliti besarnya peranan sewaktu berada pada penelitian, mau tidak mau peneliti akan terjun ke dalamnya dan akan ikut berperan serta di dalamnya⁵⁰,

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

Hal ini sama dengan peranan peneliti yang mengharuskan peneliti berkecimpung dalam lokasi penelitian sebagai usaha untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. pada tahap ini peneliti mendatangi rumah informan dan melakukan tanya jawab di rumah informan, sehingga informan lebih rilex menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti seputar PNPM Mandiri Pedesaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena benar tidaknya suatu data bergantung pada teknik pengumpulan data yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data terkait penelitian ini memiliki

⁵⁰ Ibid. 98

tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang akan diteliti. Data yang didapatkan peneliti berupa: rekaman hasil wawancara dengan informan, catatan-catatan yang tertulis pada buku peneliti, materi MADPJ (musyawarah antar desa pertanggung jawaban) berupa rekapitulasi pendanaan BLM PNPM MP Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2014, daftar hadir ketika rapat, proposal perguliran dana, daftar nama anggota, dan dokumentasi foto. Adapun bentuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain:

a. Observasi⁵¹

Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan Melalui metode ini, peneliti mengamati fenomena yang relevan dengan pokok pembahasan peneliti, yaitu "Kebijakan Pemerintah Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)." Maka peneliti mengamati tentang: 1) kondisi bangunan yang mendapatkan dana dari PNPM MP, 2) partisipasi masyarakat pada program pnpm mandiri pedesaan dengan melihat daftar hadir ketika diadakan musyawarah pada program SPP, 3) efektivitas program SPP pada perubahan perekonomian masyarakat Desa Banyutengah.

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi-Mixed Methode (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 226.

b. Wawancara⁵²

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tetentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Karena dengan penelitian ini proses wawancara dapat bersifat flexibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan tetapi tetap ada pedoman awal wawancara sebagai acuan agar proses wawancara dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.⁵³ sehingga akan diketahui kondisi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Informan yang dipilih merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam, mengetahui informasi yang diperlukan, dan berhubungan dengan kasus penelitian.

Peneliti langsung turun ke lapangan dengan cara peneliti mendatangi rumah informan dan melakukan tanya jawab di rumah informan, sehingga informan lebih rilex menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti seputar PNPM Mandiri Pedesaan. terkait Kebijakan Pemerintah Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

_

⁵² Ibid hal **231**

⁵³ Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja, 2006), hal 138.

c. Dokumentasi

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang informan melalui dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh informan yang bersangkutan. Dalam hal ini diperlukan guna melengkapi hal-hal yang dirasa belum cukup dalam data-data yang diperoleh⁵⁴. Dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, antara lain: catatan-catatan yang tertulis pada buku peneliti, materi MADPJ (musyawarah antar desa pertanggung jawaban) berupa rekapitulasi pendanaan BLM PNPM MP Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2014, Buku rapat anggota, proposal perguliran dana, buku daftar anggota pemanfaat, dan dokumentasi foto. Dasar Hukum yang berkaitan dengan PNPM mandiri Pedesaan yakni:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
 Tentang
- 3) Sistem Pemerintahan
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintahan Daerah.

_

⁵⁴ Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta:Salemba Humanika, 2012) hal, 144

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor
 73/2005 tentang Kelurahan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4) Sistem Perencanaan

- a. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- c. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata
 Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

5) Sistem Keuangan Negara

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
 Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata
 Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
 serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4597)
- f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.

- g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
 No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan
 dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang
 Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Teknik Penentuan Informan

Teknik dalam pemilihan informan selanjutnya yaitu dengan menggunakan *Purposive Sample (Sampel Bertujuan)*, artinya Teknik penentuan sumber data dilakukan melalui pertimbangan terlebih dahulu, tidak diacak-acak. Berdasarkan ciri-ciri yang dibutuhkan oleh peneliti. Pertimbangan tersebut meliputi (1) informan menguasai permasalahan yang diteliti (2) informan memiliki data yang relevan dengan penelitian (3) informan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, informan dalam hal ini harus memenuhi syarat tersebut di atas. Adapun yang menjadi informan dalam hal ini adalah:

_

⁵⁵ Ibid, hal 106

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Muzayyin	Kaur Perencanaan
2.	Taufiqurrahman	Bendahara UPK
3.	Fandholi	Kepala Desa Banyutengah
4.	Ilham	Sopir
5.	Munif	Masyarakat Ds Banyutengah
6.	Anshori	Petani
7.	Toni	Tim Pelaksana Kegiatan
8.	Lilik	Guru Tk
9.	Indah	Masyarakat Ds Banyutengah
10.	Malik	Masyarakat Ds Banyutengah
11.	Muntama'ah	Ketua Kelompok SPP
12.	Zakariah	Pedagang kambing
13.	Tatik Hidayati	Pedagang Es Tebu, Mantan
$A \parallel$		TKI
14.	Khoirul	Petani
15.	Yaumi	Petani, Mantan TKI
16.	Husniah	Guru Swasta
17.	Misnan	TKI

7. Teknik Analisis Data

Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan, menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data kemudian ditarik makna-makna dan kesimpulan. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. ⁵⁶ Teknik analisis data dalam suatu penelitian sangat di perlukan agar data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis

-

⁵⁶ Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran,* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013), hal 280

teori-teori hukum sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul dapat lebih dipertanggung jawabkan.⁵⁷

a. Tahap Analisis Data

1) Analisis Data

Melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, peneliti dalam hal ini bisa melakukan interpretasi dari data yang didapatkan dilapangan.

2) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik sumber apakah data tersebut valid atau tidak, data yang peneliti dapatkan dari perangkat desa dan pihak UPK adalah valid.

3) Narasi Hasil Analisis

Langkah terakhir adalah pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan Data yaitu teknik pemerikasaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekkan atau pembanding terhadap data tersebut. Untuk

pariona Saakanta *Dangantar Danalitian Hukum* (Jakarta

⁵⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 25

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat Kepercayaan (Credibility), Keteralihan (Transferability), Kebergantungan (Dependability), Dan Kepastian (Confirmability).⁵⁸

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek⁵⁹.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono⁶⁰, menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles and Huberman dalam Sugiyono⁶¹, megemukakan aktivitas dalam analisis

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2007), hal 173

⁵⁹ Miles, MattHew B.Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2007) hal 139

⁶⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2005) hal 236

⁶¹ Ibid. 237

data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melakukan wawancara kembali dilain waktu untuk melanjutkan pertanyaan yang kurang terjawab, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

1. Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 2. Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongan, mengarahkan,

membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi⁶² reduksi data berlangsung secara terus menrus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan. 3. Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, dan tabel sebagai narasinya. 4. Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi yang utuh⁶³. kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti polapola, menyususn pencatatan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi, kalaupun peneliti tidak menggambarkan mengenai kesimpulan yang diharapkan maka akan tetap dilakukan perbaikan demi mendapatkan hasil yang baik.

⁶² Miles, MattHew B.Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.* Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2007) hal 16

⁶³ Ibid hal 18

c. Validitas

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. ⁶⁴ Peneliti menggunakan 4 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu: ⁶⁵

- 1) Perpanjangan Pengamatan: Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Ketika sudah memperoleh data peneliti mengecek kembali apakah ada informasi yang kurang lengkap, jika dirasa belum lengkap peneliti akan melakukan wawancara kembali kepada informan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Peningkatkan Ketekunan: Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti melakukan dengan cara membaca hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat

-

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005), hal 117.

⁶⁵ Ibid. hal 122

laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat menjadi berkualitas.

3) Triangulasi⁶⁶: Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekkan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada 4 macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan Sumber, Metode, Penyidik, Dan Teori.

Kemudian peneliti akan menggunakan teknik *trianggulasi sumber* sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang berarti peneliti akan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu. 4. Membandingkan berbagai perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, penerima dana PNPM, ketua kelompok simpan pinjam perempuan, pengurus PNPM.

-

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2007), hal 178

4) Kecukupan referensi: Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sbagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

No	Uraian kegiatan	Waktu				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mart
1.	Tahap Persiapan Penelitian:					
	a. Penyusunan dan pengajuan					
	judul					
	b. Penyusunan instrumen					
	c. Pengajuan proposal					
No	Uraian <mark>Ke</mark> gia <mark>ta</mark> n	Waktu				
		Apr	Mei	Juni	Juli	
1.	Tahap Pelaksanaan:				1	
	a. Pengum <mark>pu</mark> lan <mark>d</mark> ata				V	
	b. Analisis dan pengolahan					
	data					
3.	Tahap Penyusunan Laporan:					
	a. Menyusun laporan hasil		2			
	penelitian	11				
	a. Seminar penelitian					

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK PNPM DI DESA BANYUTENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Gambar 4.1
Peta Lokasi Desa Banyutengah



Sumber: Arsip Desa, Peta Lokasi Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Luas Wilayah

Desa Banyutengah terletak di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan luas seluruhnya 187.952 Ha yang terdiri dari :

a. Sawah : 8.500 Ha

b. Tegalan : 147.505 Ha

c. Pekarangan: 16.853 Ha

d. lain-lain : 15.094 Ha

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara: Desa Campurejo Kecamatan Panceng
- b. Sebelah timur : Desa Dalegan Kecamatan Panceng
- c. Sebelah Selatan : Desa Ketanen dan Pantenan Kecamatan
 Panceng
- d. Sebelah Barat : Desa Telogo sadang Kecamatan Paciran Kab.

Lamongan

3. Geografi dan Topografi

Desa Banyutengah berada ± 5 Km dari permukaan air laut dengan curah hujan ± 1.500 m³ pertahun. Desa Banyutengah terdiri dari tanah tegalan, sawah dan pemukiman penduduk, masyarakat desa sebagian besar bekerja sebagai petani, dengan menggunakan sistem tadah hujan karena belum memungkinkan untuk bertani dengan sistem irigasi, disamping itu juga tidak sedikit yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

4. Orbitasi (Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pemerintahan Kecamatan: 04 Km
- b. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten : 45 Km
- c. Jarak dari Pemerintahan Propinsi: 62 Km

5. Jumlah Penduduk Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Penduduk desa Banyutengah pada tahun 2018 berjumlah 3.291 jiwa yang terdiri dari 936 Kepala Keluarga (KK). Seluruh

penduduk desa Banyutengah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Banyutengah 2009-2015 ⁶⁷

Tahun	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
2015	1.640	1.658	3.298
2014	1.687	1.644	3.331
2013	1.613	1.617	3.230
2012	1.697	1.493	3.190
2011	1.529	1.536	3.605
2010	1.492	1.506	2.998
2009	1.745	1.461	3.206

Sumber: Arsip Desa, Jumlah Penduduk Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2009-2015

6. Pendidikan Masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Masyarakat desa Banyutengah jika ditinjau dari latar belakang pendidikanya memang masih tergolong rendah, karena sebagian besar latar belakang pendidikan mereka hanya lulusan SD sederajat, hal itulah yang membuat masyarakat tidak berinovasi dalam lapangan pekerjaan, mereka senantiasa melakukan pekerjaan yang sudah ditekuni sejak dahulu tanpa ingin mengadakan suatu pembaharuan, padahal jika pembaharuan itu diciptakan akan bermanfaat bagi pendapatanya, hal itu menyebabkan adanya ketimpangan sosial di desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁷ Arsip Desa, Jumlah Penduduk Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

 ${\it Tabel 4.2}$ Data Pendidikan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2018^{68}

No	Tingkat Pendidikan	Laki- Laki	Peremp uan	Jumlah
1.	Usia 3-6 th yang belum masuk TK	14	23	37
2.	Tamat SMA/ Sederajat	364	1.009	1.373
3.	Tamat SMP/Sederajat	494	1.167	1.661
4.	Usia 18-56 th tidak tamat MA/SMA	124	185	309
5.	Usia 12-56 th tidak tamat MTS/SMP	59	86	145
6.	Tamat SD/sederajat	1.004	2.123	3.127
7,	Usia 18-56 th tidak tamat SD	26	33	59
8.	Usia 18-56 th tidak pernah sekolah	29	53	82
9.	Usia 7-18 th yang sedang sekolah	224	401	625
10.	Usia 7-18 th yang tidak sekolah	8	5	13
11	Usia 3-6 th TK/playgroub	33	41	74
12	Tamat D1 dan S1	96	215	311

Sumber: Arsip Desa, Data Pendidikan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2018

7. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

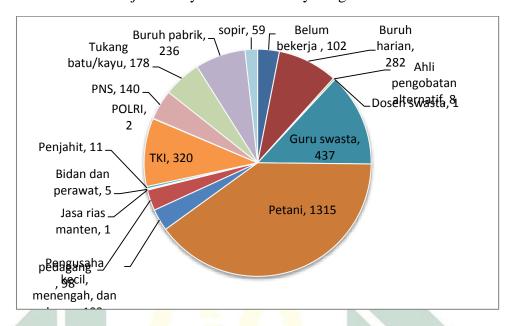
Berikut peneliti akan mencantumkan mata pencaharian penduduk dari tahun 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 agar pembaca dapat memahami perbandingan pekerjaan dari Tahun ke Tahun.

⁶⁸ Arsip Desa, Data Pendidikan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diagram 4.1

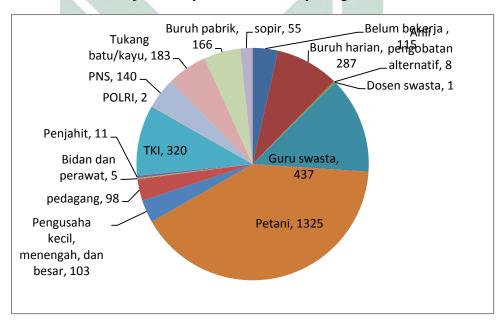
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2015⁶⁹



Sumber: Arsip Desa, Data jenis pekerjaan masyarakat desa Banyutengah tahun 2015

Diagram 4.2

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah tahun 2014

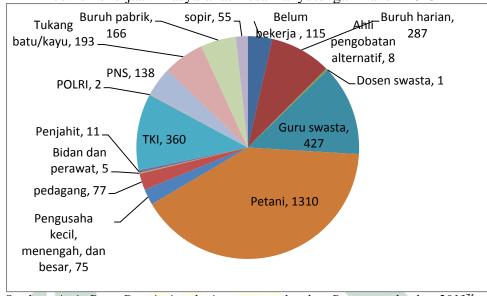


Sumber: Arsip Desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2014⁷⁰

⁶⁹ Arsip Desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2015

Diagram 4.3

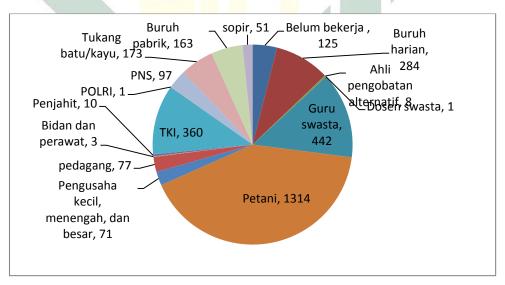
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2013



Sumber: Arsip Desa, Data jenis pekerjaan masyarakat desa Banyutengah tahun 2013⁷¹

Diagram 4.4

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2012⁷²



Sumber: Arsip Desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah tahun 2012

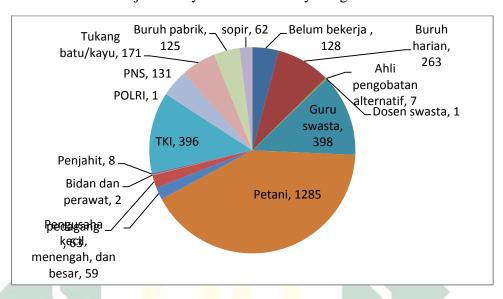
⁷⁰ Arsip Desa, *Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2014*

⁷¹ Ibid Tahun 2013

⁷² Ibid Tahun 2012

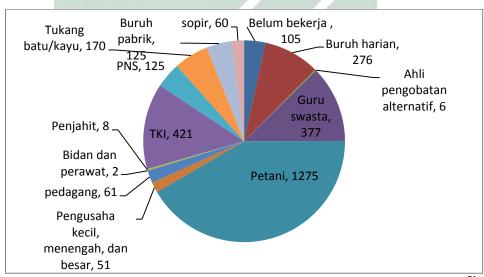
Diagram 4.5

Jenis Pekerjaan masyarakat Desa Banyutengah tahun 2011



Sumber: arsip desa, dat<mark>a je</mark>nis <mark>pekerja</mark>an <mark>ma</mark>syara<mark>kat</mark> desa banyutengah tahun 2011⁷³

Diagram 4.6
Jenis Pekerjaan masyarakat desa banyutengah tahun 2010



Sumber: Arsip Desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2010⁷⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷³ Arsip Desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2011

Buruh pabrik, sopir, 60 Belum bekerja, Tukang Buruh harian, 125 168 batu/kayu, 170 278 PNS, 125 Ahli pengobatan alternatif, 6 Penjahit, 8_ swasta, TKI, 425 Bidan dan 440 perawat, 1 pedagang, 61 Petani, 1338 Pengusaha kecil, menengah, dan besar, 51

Diagram 4.7 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009

Sumber: arsip desa, data jenis pekerjaan masyarakat desa banyutengah tahun 2009⁷⁵

Perekonomian masyarakat Desa Banyutengah sangat beragam, namun mayoritas masyarakat Desa Banyutengah bermata pencaharian sebagai Petani, mengingat kondisi tanah pada desa tersebut sangat subur, hal itulah yang menjadi alasan mendasar masyarakat untuk tetap bekerja sebagai petani. Selain itu masyarakatpun ada yang bekerja sebagai buruh harian yakni kuli bangunan dan menjadi buruh pabrik, karena pada daerah tersebut memang banyak terdapat pabrik yang beroprasi dan mempekerjakan warga setempat. Adapula yang bermata pencaharian sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bagi masyarakat yang umurnya masih muda, mereka lebih memilih pergi ke luar Negri untuk menjadi TKI, hal itu dilakukan untuk memperbaiki perekonomian keluarga.

⁷⁴ Ibid, *Tahun 2010*

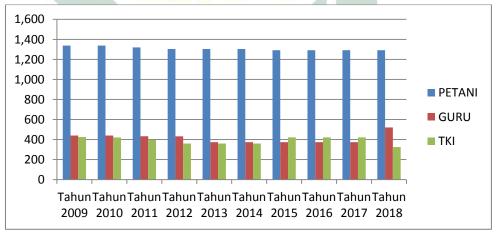
⁷⁵Arsip Desa, Data jenis pekerjaan masyarakat desa Banyutengah tahun 2009

Dengan adanya bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan demikian bantuan dan program ini sangatlah membantu masyarakat. Program ini diharapkan menjadi suatu saluran peningkatan kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan mutu dan kemandirian masyarakat.

Kemudian peneliti menggunakan diagram untuk membandingkan tiga pekerjaan mayoritas masyarakat dari tahun 2009 sampai dengan 2010 yakni: Petani, Guru dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Diagram 4.8.

Pekerjaan Mayoritas Masyarakat dari Tahun 2009-2018



Sumber: Arsip Desa, Pekerjaan Mayoritas Masyarakat Dari Tahun 2009 – 2018

B. KEBIJAKAN PNPM MP DI DESA BANYUTENGAH

Deskripsi data merupakan penjelasan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengggunakan teknik analisis data kualitatif. Secara umum ada dua jenis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan yang didapatkan dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, dalam penelitian ini katakata dan tindakan informan menjadi sumber utama dalam penelitian. Sumber tersebut oleh peneliti dicatat menggunakan catatan tertulis dan menggunakan alat perekam suara yang digunakan dalam penelitian.

Selain data primer peneliti juga menemukan data sekunder, adapun data sekunder yang peneliti dapatkan meliputi : Dokumentasi foto berupa kegiatan, Rekapitulasi Pendanaan BLM PNPM-MP Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2014. Proposal perguliran dana, buku rapat anggota, buku daftar anggota pemanfaat. Data-data tersebut sebagai data pendukung yang digunakan peneliti. berikut merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, Partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Desa Banyutengah baru mulai menjadi desa sasaran yang mendapatkan dana PNPM MP sejak tahun 2009 hingga tahun 2015. Kemudian tahun 2015-2018 dilanjutkan dengan nama BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa).⁷⁶ Kemudian untuk data primer peneliti akan

⁷⁶ Taufiurrahman, wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB

menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Kemudian, untuk Pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN mengacu pada petunjuk teknik pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. Penyaluran dana dilakukan dari rekening kolektif BLM sebesar 3 M yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan kepada Tim Pengelola Kegiatan di Desa. Pencairan dana ada 3 tahap, tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%. Dana untuk satu kegiatan maksimal 350 juta⁷⁷.

Selain pembangunan infrastruktur dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Banyutengah juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, hal itu dibantu oleh kepala desa untuk verifikasi siapa sajakah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Program PNPM yang ada di Desa Banyutengah dirasa telah sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain⁷⁸:

 Bertumpu pada Pembangunan Manusia
 Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

2. Otonomi

.

78 Ibid hal 06

⁷⁷ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dam Desa, *PTO* (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*), hal 11

Masyarakat desa Banyutengah diberikan hak dan kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola

3. Desentralisasi

Pada proses pengelolaan kegiatan tidak ada yang menyalahgunakan kewenanganya, semuanya akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

4. Berorientasi pada Masyarakat Miskin

Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, hal ini dibantu oleh kepala desa untuk mendata siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan dari PNPM.

5. Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat

Masyarakat Desa Banyutengah secara aktif ikut terlibat dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Proses Evaluasi. Maka terlihat bahwa PNPM memiliki nilai plus dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dihimbau untuk berperan secara aktif dengan memberikan sumbangan tenaga dan pikiran agar hasil program benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sendiri yang merancang dan membangun apa yang menjadi kebutuhan mereka. Masyarakat

_

⁷⁹ Taufiurrahman (Bendahara UPK), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB

mendaftarkan diri untuk ikut andil dalam pelaksanaan program tanpa paksaan.

6. Kesetaraan dan Keadilan Gender Laki-laki dan perempuan Pada Desa Banyutengah unsur perempuan selalu dilibatkan, hal inilah yang menjadi bukti bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam peranya di setiap tahap dalam pembangunan dan menikmati manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

7. Demokrasi

Masyarakat Desa Banyutengah senantiasa ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, jadi tidak ada yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil sudah melalui kesepakatan bersama dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

8. Transparansi dan Akuntabel

Pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan – baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. Sehingga masyarakat dapat melihat informasi apapun yang berkaitan dengan kegiatan PNPM di Desa Banyutengah dengan mudah.

9. Prioritas

Masyarakat miskin yang ada di Desa Banyutengah merupakan prioritas yang kebutuhanya wajib dipenuhi

10. Kolaborasi

Masyarakat Desa Banyutengah dalam melaksanakan program kegiatan melakukan kolaborasi yang baik antara pihak TPK dan UPK sehingga kegiatan berjalan dengan lancar sesuai rencana yang ditetapkan.

11. Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar Desa Banyutengah semakin maju.

12. Seder<mark>ha</mark>na

Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu mengelola Sumber Daya yang ada dengan baik dan bijaksana.

B. Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah menguji kredibilitas data, Peneliti menggunakan 4 cara yaitu:

Perpanjangan Pengamatan: peneliti melakukan wawancara kembali jika ada data yang dirasa kurang lengkap, serta menambahkan informan baru tanpa menghilangkan informan kunci yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Peningkatkan Ketekunan: peneliti melakukan penggalian data secara tekun dengan tujuan memperoleh data yang benar. Triangulasi sumber: peneliti Membandingkan data hasil pengamatan dari dokumen PNPM dengan hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan informan ketika diwawancara di tempat umum dengan apa yang dikatakan informan di rumahnya sendiri. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang peneliti dapatkan ketika observasi. 4. Membandingkan pendapat masing-masing informan, dari kepala desa, pejabat desa, pengurus UPK, masyrakat umum, penerima dana PNPM, ketua kelompok simpan pinjam perempuan, pengurus PNPM. sehingga peneliti dapat menyimpulkan dengan baik data yang telah diperoleh. Kecukupan referensi: peneliti mencatat apa yang diutarakan oleh inorman dan merekamnya dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu: interpretasi penelitian, yaitu melakukan kajian penemuan dilapangan dengan dasar oprasional yang telah ditentukan sejak awal, kemudian melihatnya scara teoritis.

Dalam hal ini teori yang relevan adalah Merile S. Grindle (dalam subarsono) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, 3) sejauhmana perubahan yang

83

diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah

tepat. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa

besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor

yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan

rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas

kelompok sasaran⁸⁰

Setelah itu peneliti menggunakan Teori Partisipasi Masyarakat

karena Pemberdayaan masyarakat itu bisa dikatakan baik jika melibatkan

partisipasi masyarakat. Teori Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

khususnya dibidang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MP) yang dikemukakan oleh Uphoff, Cohen, dan

Goldsmith, ialah: partisipasi merupakan istilah deskriptif yang

menunjukan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam

berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan

hidup mereka.

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan di Desa Banyutengah

Pelaku kebijakan, Lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik

yang dikeluarkan itu merupakan suatu yang saling berkaitan. Hal itu

menunjukan bahwa keberhasilan implementasi tidak terlepas dari ketiga

komponen tersebut. Karakteristik kebijakan yang dikeluarkan haruslah

sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sebagai target dari kebijakan.

⁸⁰ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan* aplikasi). (Pustaka Pelajar.

Yogyakarta: 2011) Hal 93

Maka jika ingin memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai pelaku, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk merealisasikanya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pemahaman terkait Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang merupakan produk dari kebijakan publik yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kondisi lingkungan dan pelaku kebijakan dengan tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan.

Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai, untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier implementasi kebijakan merupakan upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan⁸¹. Berkaitan dengan topik penelitian implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah maka di dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan Teori Kebijakan dari Riant, dengan melihat halhal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan antara lain seperti ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Sedangkan mengenai aktor-aktor yang

⁸¹ Wahab Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) Hal 65

85

menjadi pendorong dan penghambat implementasi dianalisis

menggunakan Teori Implementasi.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (dalam

subarsono) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context

implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup : 1) sejauh mana

kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis

manfaat yang diterima oleh target group, 3) sejauhmana perubahan yang

diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah

tepat. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa

besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor

yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan

rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas

kelompok sasaran⁸²

Berdasarkan teori tersebut maka peneliti memberikan analisis

dilihat dari isi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepentingan kelompok sasaran

Sasaran atau target PNPM MP adalah masyarakat miskin, yang

diamati melalui 3 fenomena yaitu: a. Keberpihakan program PNPM

MP kepada masyarakat miskin b. meningkatkan keeratan gotong

royong masyarakat dalam program PNPM MP c. meningkatkan

82 AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan* aplikasi). (Pustaka Pelajar.

keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program PNPM MP.

a) Keberpihakan program PNPM MP kepada masyarakat miskin

Didalam ketepatan kebijakan, PNPM Mandiri Pedesaan dikatakan baik karena PNPM Mandiri Pedesaan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Desa Banyutengah melalui program Simpan pinjam perempuan (SPP) yakni dengan cara memberikan modal kepada ibu-ibu yang ingin berwirausaha, kemudian PNPM Mandiri Pedesaan juga membangun inrastruktur di Desa Banyutengah, PNPM Mandiri sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan yakni pengentasan kemiskinan pada masyarakat miskin, adanya strategistrategi dalam mencapai tujuan dan PNPM Mandiri dibuat oleh lembaga Kementerian Koordinator Kesra, Bappenas, Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri.

Didalam ketepatan pelaksanaan masing-masing aktor implementasi kebijakan, pada pihak UPK telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni melakukan koordinasi kepada masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi. Sedangkan pada pihak masyarakat, masyarakat senantiasi berpartisipasi dalam program infrastruktur maupun program simpan pinjam perempuan sehingga implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

b) Meningkatkan keeratan gotong royong masyarakat dalam PNPM

Pada masyarakat Desa Banyutengah peningkaan gotong royong sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari saling bekerja sama sesama warga pada pembangunan infrastruktur desa. Pada saat pembangunan jalan, pembangunan polindes, pembangunan gedung TK seluruh lapisan masyarakat turut bergotong royong utuk menyelesaikan pembangunan.

c) Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program PNPM MP.

Pelaksanaanya terlihat pada saat pelibatan masyarakat secara langsung baik ketika pembangunan program inrastruktur maupun program simpan pinjam perempuan. Karena memang PNPM MP memiliki dua program maka sasaranya pun ada dua, jika itu berkaitan dengan program Simpan pinjam perempuan, maka targetnya yaitu khusus perempuan. Kemudian implementasi PNPM Mandiri pedesaan di Desa Banyutengah terkait simpan pinjam perempuan tergolong baik, pada Desa Banyutengah yang menjadi anggota kelompok simpan pinjam perempuan keseluruhan memang terdiri dari ibu-ibu yang berkepentingan membuka usaha yang bermodalkan dari dana pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan, dari hal itulah tercipta kemandirian sosial pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha yang ditekuni.

Terkait program pembangunan inrastruktur, target PNPM MP adalah seluruh lapisan masyarakat karena hal itu menyangkut kepentingan umum. Pada partisipasi masyarakat Desa Banyutengah secara keseluruhan masyarakat berperan aktif karena dari proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi semuanya telah terpenuhi.

2. Manfaat yang Diterima oleh Masyrakat Desa Banyutengah Melalui Program PNPM MP

Masyarakat Desa Banyutengah mendapatkan berbagai macam manfaat dari program PNPM MP antara lain:

- a. Infrastruktur di Desa Banyutengah menjadi lebih baik
- b. Adanya proses pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat turut serta terlibat pada proses pembangunan infrastruktur desa
- c. Paradigma masyarakat menjadi lebih maju dan terbuka
- d. Memupuk rasa solidaritas yang tinggi sesama warga untuk saling menjaga dan merawat infrastruktur desa yang dalam setiap prosesnya selalu melibatkan masyarakat.
- e. Masyarakat dapat berwirausaha yang bermodalkan dari dana simpan pinjam perempuan yang juga merupakan program dari PNPM MP
- f. Masyarakat memiliki pendapatan perbulan dari hasil wirausaha tersebut.

Karena terdapat manfaat yang diterima oleh masyarakat maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan PNPM MP ini sudah baik.

3. Perubahan yang diinginkan dari program PNPM MP pada wilayah Desa Banyutengah

Dampak yang diinginkan oleh masyarakat Desa Banyutengah itu mengarah kepada sosial ekonominya. Program PNPM MP dalam prosesnya jika dilihat dari segi sosial maka sudah terwujud dengan baik, hal itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang antusias dalam setiap tahapan kegiatan yakni proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi. Hal itu sesuai dengan pernyataan UPK yakni:

...Nah untuk itu tadi karena pnpm in<mark>i p</mark>rogram pemberdayaan sudah saya jelaskan d<mark>ar</mark>i awal bahwa masyarakat desa banyutengah ini ikut berpartisip<mark>asi</mark> dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi itu wajib berpartisipasi...⁸³

Kemudian terkait dampak ekonominya PNPM MP telah berhasil melakukan suatu perubahan pendapatan pada anggota kelompok simpan pinjam perempuan. pada dasarnya setiap anggota sebelum menjadi anggota kelompok simpan pinjam perempuan ini memiliki latar belakang perekonomian yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan bermacam-macam jenis pekerjaan masyarakat Desa Banyutengah, namun ketika menjadi anggota pendapatan mereka menjadi lebih stabil karena mereka berwirausaha dari dana pinjaman PNPM MP. Hal ini diutarakan oleh ibu Tatik salah satu anggota kelompok simpan pinjam perempuan:

_

⁸³ Taufiqurrahman (Bendahara UPK), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB

...seneng gitu bisa pinjam modal ke PNPM MP, nggak pakek ribet syarat ini itu, tinggal setor KTP dan KK langsung cair, dulu kalau tidak dapat pinjaman dari PNPM mungkin sampai sekarang saya tidak dapat penghasilan, alhamdulilahnya sekarang penghasilan saya kurang lebih 5Jt perbulan dari hasil berjualan es tebu, tapi itu masih itung-itungan kotor, belum dikurangi buat beli plastik, tebu dll...⁸⁴

Maka implementasi PNPM MP sudah baik karena sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Desa Banyutengah.

4. Ketepatan program PNPM MP pada masyarakat Desa Banyutengah

Didalam ketepatan lingkungan, interaksi antara pembuat kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah dilakukan dengan cara koordinasi, komunikasi dan pendampingan oleh pihak UPK kepada masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi. Didalam ketepatan proses, adanya penerimaan dan kesiapan yang baik dari masyarakat Desa Banyutengah mengenai PNPM Mandiri pedesaan, karena memang pada awal masuknya PNPM di Desa Banyutengah pihak KPMD sudah melakukan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat melalui forum-forum yang ada di desa, hal ini sesuai dengan pernyataan KPMD sebagai berikut:

...di awal program ada penggalian gagasan/ menggali ide masyarakat yang harus dilakukan, untuk usul, enaknya desa ini diberikan program apa? Pada awalnya saya melakukan pendekatan bukan hanya pada forum formal tapi di forum informal juga, seperti ketika ada kegiatan fatayat, muslimat, aisiyah saya masuk untuk memberikan sosialisasi dan menanyakan program apa yang akan dilakukan untuk desa ini, ingin dibangun apa dan sebagainya...⁸⁵

.

⁸⁴ Tatik Hidayati (Pedagang es tebu), wawancara dilakukan oleh peneliti,26 mei 2018, pada jam 14:05 WIB

⁸⁵ Taufiqurrahman (KPMD Banyutengah dan Bendahara UPK),wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 mei 2018, pada jam 20:00 WIB

pada setiap prosesnya selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

Teori Merile S. Grendle selain melihat dari isi kebijakan yang sudah diterangkan diatas, juga melihat teori implementasi itu dari *lingkungan kebijakanya*. Jika dikaitkan dengan PNPM MP maka analisis implementasinya sebagai berikut:

1. Kepentingan dan strategi pihak UPK untuk merealisasikan kebijakan PNPM MP ini sesuai standart PTO

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Panceng Desa Banyutengah mempunyai peran sebagai fasilitator sosial ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan dana kegiatan simpan pinjam perempuan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, UPK kecamatan panceng dapat memberikan solusi melalui pemberian akses modal usaha untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin, selain itu pihak UPK juga berperan aktif untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Strategi yang digunakan pihak UPK pada masyarakat Desa Banyutengah adalah dengan cara pembentukan kelompok dan pemilihan ketua kelompok sebagai penanggung jawab yang dilakukan oleh anggota kelompok itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial dari pihak manapun, dan dari pihak UPK hanya membantu mendampingi dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian

ketika proses peminjaman, pihak UPK melakukan verifikasi kepada masyarakat yang akan meminjam dana PNPM MP, pada tahap evaluasi pihak UPK juga senantiasa melakukan kunjungan ke rumah ketua kelompok yang sudah dhadiri oleh anggota kelompok simpan pinjam perempuan itu untuk menanyakan kendala dan hambatan yang terjadi selama proses simpan pinjam perempuan. Hal itu sesuai dengan pernyataan ibu muntamaah selaku ketua kelompok simpan pinjam perempuan:

...Ooh ya selalu di dampingi, kalau nggak di dampingi mana bisa jalan, wong ya masyarakat iki ngerti opo se mbak? Ngertine yo utang iku ae, ya iya lah, pokoknya kalau waktunya peminjaman itu pihak kecamatan datang untuk verivikas<mark>i, s</mark>elesai<mark>n</mark>ya <mark>ju</mark>ga d<mark>at</mark>ang untuk evaluasi, ditanya kendala dll, ngobrol-ngobrol biasa saja gak formal kok...⁸⁶

Pernyataan serupa dari bapak kepala desa yakni:

...Dari kecamatan itu pengurusnya selalu aktif dimana ketika anggota kelompok yang terlambat melakukan pembayaran itu langsung melapor kepada kepala desa, jadi penanganya sangat transparan dan bisa ditindak lanjuti secara berkala, artinya manakala ada peminjam yang terlambat mengangsur pastinya dapat diketahui oleh kepala desa dan dapat ditanyakan mengapa, bagaimana kok bisa seperti ini...⁸⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa implementasi yang dilakukan oleh pihak UPK terkait kepentingan dan strateginya dalam proses PNPM MP sudah terlaksana dengan baik.

2. Karakteristik pemerintah Desa Banyutengah

86 Muntamaah (Ketua Kelompok SPP), wawancara dilakukan oleh peneliti, 27 mei 2018 jam 19:00

⁸⁷ Fandholi (kepala desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 mei 2018, pada jam 10:15 WIB

Karakteristik Kepala desa Banyutengah kepemimpinanya termasuk pada tipe kepemimpinan inovatif-progresif yang melibatkan partisipasi masyarakat desa. sangat mendukung PNPM MP ini, dikarenakan dapat memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat Desa Banyutengah. Pernyataan dari bapak fandholi selaku kepala desa :

...Sangat mendukung sekali, masyarakat juga sangat antusias, dimana program-programnya bukan hanya sarana permodalan tapi juga ada nilai-nilai sosial, ada dana untuk pembangunan yang dikucurkan ke desa...⁸⁸

Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pengelola lembaga dalam mensosialisasikan program dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan pernyataan kepala desa banyutengah:

...sosialisasi diawal itu, pihak pnpm meminta waktu kepada masyarakat dan Mengumpulkan warga masyarakat untuk mensosialisasikan adanya pnpm, bahwa program-program pnpm sesuai dengan apa yang disampaikan dulu di awal yakni ketika sosialisasi dilakukan oleh pelaku pnpm bersama dengan pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat...⁸⁹

Maka dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kepala Desa sangat mendukung adanya PNPM MP.

3. Responsivitas masyarakat desa Banyutengah terhadap PNPM MP.

Respon masyarakat Desa Banyutengah sangat antusias, masyarakat memiliki semangat dalam melaksanakan PNPM karena

.

⁸⁸ Ibid, 25 mei 2018, pada jam 10:15 WIB

⁸⁹ Ibid, 25 mei 2018, pada jam 10:15 WIB

keterlibatan masyarakat juga dirasakan penting untuk realisasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Maka peneliti menghubungkan dari Teori Implementasi Kebijakan Ke Teori Partisipasi Masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat itu bisa dikatakan baik jika melibatkan partisipasi masyarakat. **Partisipasi** masyarakat dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanan, menikmati hasil atau pemanfaatan dan evaluasi. Partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, serta dalam evaluasi pelaksanaan program⁹⁰.

Perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan hakikatnya hanya menentukan tujuan dari serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Nasution sociologi nendidik

⁹⁰ S. Nasution, sosiologi pendidikan (jakarta:Bumi Aksara,2010) hal, 16

Pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaanya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

Menikmati hasil yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Evaluasi dianggap penting sebab partisispasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Dalam pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan di Desa Banyutengah masih perlu ditingkatkan karena pada proses perencaan masyarakat masih kurang minat dalam berpartisipasi, padahal pada tahap ini sangat penting karena program tersebut bertujuan memberdayakan masyarakat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

A. Tahap Partisipasi Masyarakat pada Program Infrastruktur

a) Tahap Perencanaan

keterlibatan Tahap perencanaan ditandai dengan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan infrastruktur yang ada di Desa, tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam Program Nasional Masyarakat Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Di Desa Banyutengah. Dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat dilihat seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap program yang akan dilakukan. Pada tahap perencanaan masyarakat desa Banyutengah menggunakan model Bottom up, dimana perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, button up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator⁹¹.

Sebelum musyawarah di kecamatan, Terlebih dahulu diadakan musyawarah di desa Banyutengah, musyawarah merupakan kegiatan rutin 3 bulan sekali yang diadakan dibalai desa. Hal itu dilakukan guna mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat, agenda musyawarah tersebut yaitu membahas

⁹¹ Soetrisno loekman, menuju masyarakat partisipatif (yogyakarta:kanisius, 1995) hal 225

mengenai keluhan masyarakat desa banyutengah, jadi dari musyawarah tersebutlah dapat diketahui usulan masyarakat terkait pembangunan desa Banyutengah. Pernyataan dari bapak fandholi selaku kepala desa:

> ...terkadang masyarakat itu bisa lebih terbuka ketika diadakan musyawarah guyup rukun, mereka bisa mengusulkan tanpa malu-malu, kan pada musyawarah itu memang seperti jandonan gitu, tidak formal, undanganya pun hanya dari mulut ke mulut tidak pakai selebaran jadi sifatnya pun umum, kadang disambi nobar bola kalau ada pertandingan bola, ya pakai LCD gitu...⁹²

Setelah musyawarah di desa, kepala desa sudah memiliki bekal yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kecamatan atau yang lebih dikenal dengan nama Musyawarah Antar Desa (MAD). MAD adalah sebuah forum yang diadakan untuk menentukan prioritas usulan yang nantinya akan ditetapkan menjadi sebuah program pada tahun berikutnya. Pada forum tersebut ada 7 delegasi dari desa sebagai perwakilan yang wajib hadir yakni: 1. Kepala Desa 2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 3. LPMD 4. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat) 5. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) 6. Tokoh Masyarakat 7. Perwakilan perempuan. Dalam forum ini, masing-masing delegasi Desa akan membawa 3 usulan, kemudian Setelah penilaian dalam

92 Fandholi (kepala desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 mei 2018, pada

jam 10:15 WIB

kelompok telah selesai dilakukan, maka nilai itu akan diakumulasikan dalam sidang pleno untuk menentukan usulan mana yang akan menempati ranking teratas setelah dilakukan penilaian.

Setelah mendapatkan urutan prioritas pelaksanaan program sesuai ranking beserta dengan berapa alokasi dana yang dibutuhkan, lalu disesuaikan dengan dana yang diterima oleh Kecamatan setelah dana tersebut dipotong oleh Dana Operasional. Dengan cara perangkingan tersebut masyarakat tidak lagi memiliki rasa kecemburuan sosial jika program yang diusulkan tidak disetujui, karena seluruh anggota forum berhak menyuarakan pendapatnya masing-masing.

Setelah diadakan rapat dikecamatan, Kepala Desa Banyutengah akan mengadakan musyawarah di Desa Banyutengah dengan mengundang Ketua RT dari RT 1 sampai RT 8, Ketua RW 1 sampai RW 4, Ketua Organisasi IPPNU, Karang Taruna, Aisiyah, Fatayat, Muslimat, dan Perangkat Desa. Pernyataan dari bapak fandholi selaku kepala desa :

...setelah ada rapat dikecamatan, saya langsung agendakan untuk musyawarah dengan masyarakat secara tebuka, tujuanya agar saya dapat mengetahui apa saja keluhan dan keinginan masyarakat. saya mengundang ketua RT,RW kemudian dari RT itu akan menyebar luaskan undangan kepada warganya sehingga undangan tersebut bersifat umum dan terbuka untuk siapapun. Semua warga kan memang berhak untuk

menyuarakan aspirasinya, namun terkadang yang datang hanya warga itu-itu saja, bagaimanapun juga tetap saya maklumi mungkin yang lainya ada kendala ketika akan menghadiri musyawarah itu⁹³...

Proses perencanaan musyawarah desa bertujuan untuk mendiskusikan insfrastruktur apa yang harus diperbaiki, menentukan siapa yang bertanggung jawab dll. Dalam pengambilan usulan dilakukan pengkajian mengenai kondisi dari setiap RT, kemudian warga akan menyampaikan usulanya terkait apa yang harus direnovasi atau diadakan, usulan dari setiap masyarakat akan di tampung dan didiskusikan secara terbuka, kemudian dipertimbangkan yang selanjutnya diputuskan mengenai pengalokasian anggaran PNPM MP Desa Banyutengah, selain itu masyarakatpun akan langsung menunjuk siapa yang mampu untuk mengemban amanah sebagai panitia dan bertanggung jawab pada program tersebut.

Untuk tingkat musyawarah ini ada sebagian masyarakat yang antusias dan adapula yang hanya hadir-duduk dan mendengarkan, bahkan ada yang tidak ikut dalam musyawarah tersebut. Partispasi masyarakat memang bermacam-macam. Kendala yang dihadapi masyarakat Desa Banyutengah dalam berpartisipasi adalah waktu dan keadaan, keadaan perekonomian yang bermacam-macam berdampak pada sempitnya waktu yang

_

 $^{^{93}}$ Fandholi (Kepala Desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 10:15 WIB

dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi, selain itu minimnya pengetahuan membuat masyarakat kurang antusias dalam berpartisipasi. Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari bapak ilham:

...saya bekerja sebagai supir, kerjanya dari pagi sampai sore kadang sampai malam, kalau tidak bekerja ya tidak dapat penghasilan kan gajinya memang tergantung muatan, Kalaupun ada rapat-rapat untuk membahas pembaharuan infrastruktur terkadang saya malas ikut karena rapatnya malam hari, kerja dari pagi sampai sore, otomatis malamnya sudah capek. Jadi itu saya serahkan saja sama yang lebih paham tapi kalau butuh jasa saya pasti ikut bergotong royong, kalau nggak ikut malu sama warga yang lain⁹⁴...

b) Tahap Pelak<mark>sa</mark>naan

Tahap pelaksanaan adalah tahap yang terpenting dalam proses pembangunan infrastruktur, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaanya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pegerjaan proyek-proyek fisik PNPM MP. Sebenarnya mudah saja jika ingin menggerakan partisipasi masyarakat desa, karena

-

⁹⁴ Ilham (masy desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 04 juni 2018, pada jam 15:15 WIB

masyarakat desa cenderung memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Mereka akan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong royong atau swadaya meskipun dengan dana yang terbatas, mereka akan senantiasa mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang harusnya menghabiskan biaya mahal.

Biasanya untuk fasilitas umum yang ada di Desa seperti tempat ibadah, balai desa, polindes, sekolah dan lainya selalu dikerjakan bergotong royong. Kenyataan seperti ini menunjukan bahwa untuk mengarahkan masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran, namun kepemimpinan seseorang juga merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya kepala desa beserta perangkatnya harus benar-benar merakyat secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian akan memperoleh simpati dari masyarakat dan akan cenderung lebih mudah mengarahkan guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya.

Partisipasi masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan
Panceng dalam tahap pelaksanaanya sebagai anggota proyek
(tenaga) mereka senantiasa bergotong royong dalam
pengerjaanya, masyarakat melakukanya dengan sukarela dengan

sedikit imbalan, namun tidak sama dengan gaji umum. sehingga meminim pembengkakan biaya yang tidak terduga. Sebagin besar partisipasi masyarakat hanya sebagai pelaksana pengerjaan proyek. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya kendala ada pada waktu, keadaan dan latar belakang pendidikan masyarakat. Masyarakat menyadari kalau mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka partisipasi masyarakat hanya sebagai pelaksana pengerjaan proyek (Buruh). Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan, bapak Munif menyatakan bahwa:

> ...say<mark>a hanya bisa menyum</mark>bangkan tenaga saya untuk program ini, soalnya saya tidak tahu kalau masalah pemikiran, maklum lah saya hanya lulusan SD jadi hanya sebatas membantu secara fisik⁹⁵...

Keterbatasan pemikiran dan ilmu pengetahuan mengharuskan masyarakat desa banyutengah hanya bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, masalah teknis hanya panitia dan sebagian masyarakat yang ikut rapat serta faham mengenai pembangunan. Masyarakat desa Banyutengah memiliki bentuk kepedulian yang tinggi jika menyangkut kesejahteraan desanya. Hal serupa diungkapkan oleh warga masyarakat lain, bapak Anshori mengatakan bahwa:

> ...saya senang sekali kalau ada kegiatan gotong royong di Desa, karna bisa kumpul-kumpul sama teman-teman

⁹⁵ Munif (masy. Desa Banyutengah) wawancara dilakukan oleh peneliti, 03 juni 2018, pada jam 15:15 WIB

sesama pekerja, jadi kelihatan kompaknya, yaa meskipun saya tidak pernah ikut rapat-rapat seperti itu menjadi buruh selalu ikut pembangunan, wong ya digaji kok meskipun gak seperti gajinya orang-orang buruh pada umumnya tapi tetap disyukuri saja kan ini demi kebaikan orang banyak jadi meskipun gajihnya sedikit tidak sia-sia⁹⁶...

Dari pernyataan Bapak Anshori dan Bapak Munif nampak bahwa masyarakat masih enggan berpartisipasi pada proses perencanaanya, mereka cenderung memilih untuk terlibat dalam proses pelaksanaan yakni mereka menempatkan dirinya sebagai buruh pekerja, meskipun dengan upah yang minim dengan alasan demi kesejahteraan masyarakat umum. Meskipun demikian partisipasi masyarakat Desa Banyutengah tetap sebagai subyek dari pembangunan dan panitia tidak secara sepihak memutuskan untuk melibatkan pemborong untuk mengerjakan proyek namun tetap mengutamakan partisipasi masyarakat. Hal tersebutlah yang dapat menguntungkan masyarakat karena tidak akan terjadi pembengkakan biaya diluar perencanaan, biaya akan terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tanpa merugikan masyarakat, bahkan lebih menguntungkan karena membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat itu sendiri.

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, khusussnya berkaitan dengan PNPM

⁹⁶ Anshori (masy. Desa Banyutengah) wawancara dilakukan oleh peneliti, 2 juni 2018, pada jam 19:30 WIB

MP. Masalah gaji tidak dijadikan kendala untuk mereka berpartisipasi, melainkan karena kuatnya prinsip gotong-royong yang melekat pada diri mereka. Kepala Desa Banyutengah juga membenarkan kalau di Desa Banyutengah jika ada kegiatan kerjabakti yang dilakukan masyarakatnya selalu antusias, beliau juga mendukung apabila PNPM MP dikerjakan masyarakat secara gotong royong untuk mempererat tali persaudaraan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh kepala Desa Banyutengah:

> ...begini, saya akui masyarakat di Desa Banyutengah ini tergolong antusias sekali ketika diajak kerja bakti, ketika mendapatkan pengumuman acara kerja bakti mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat yang akan dikerj<mark>ak</mark>an, mesk<mark>ipu</mark>n tanpa digaji sekalipun mere<mark>ka akan tetap</mark> sem<mark>an</mark>gat karena saya tahu rasa solid<mark>aritas antar</mark> s<mark>es</mark>ama warga cukup tinggi, namun jika terk<mark>ait PNPM MP k</mark>an a<mark>da</mark> panitianya sendiri, pastinya ada <mark>anggaran untu</mark>k imb<mark>al</mark>an kepada warga yang turut serta berpartisipasi, yaa meskipun sedikit hanya sebagai ganti rasa lelahnya saja, tapi saya rasa warga tidak akan mempermasalahkan hal itu kan rasa guyub rukunya memang sudah melekat pada individu masingmasing⁹⁷...

Pendapat lain yang memperkuat pernyataan tersebut diungkapkan oleh panitia pelaksana, selain memperkuat pernyataan kepala desa bapak Nur Hadi juga menjelaskan alasan pemberian upah kepada masyarakat, berikut pernyataan bapak Toni yang mengatakan bahwa:

> ...masyarakat tidak meminta bayaran, karena masyarakat berharap dari **PNPM MP** provek

⁹⁷ Fandholi (Kepala Desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 10:15 WIB

dilaksanakan secara partisipatif tanpa dialihkan kepada pemborong, maka sebagai gantinya kami selaku panitia tetap menganggarkan upah masyarakat, kasihan kan kalau tidak dibayar, mereka juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari⁹⁸...

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak memiliki tuntutan akan upah atas kontribusi yang diberikan pada pembangunan, akan tetapi upah untuk partisipasi masyarakat harus ada karena proyek tersebut yang melaksanakan adalah masyarakat.

c) Tahap Menikmati Hasil

Tahap menikmati hasil merupakan indikator keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Semakin besar manfaat proyek dirasakan, maka semakin besar keberhasilan dari pembangunan. Ada berbagai manfaat dari pembangunan proyek PNPM MP, pembangunan yang dirasa paling bermanfaat adalah yang berkaitan dengan jalan, fasilitas kesehata, fasilitas pendidikan, seperti: pada tahun 2011 infrastruktur yang mendapatkan pendanaan dari PNPM MP yakni: Jalan Paving dan jalan Rabat Beton (Pengerasan Jalan), pada Tahun 2013: Pembangunan Gedung TK, Tahun 2014: perbaikan Jalan Paving⁹⁹, hal itu menunjukan bahwa kebutuhan masyarakat sudah sangat mendesak, namun karena memang masyarakat masih cukup awam untuk melakukan kegiatan secara menyeluruh,

99 Rekapitulasi Pendanaan BLM PNPM-MP Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2014

⁹⁸ Toni (TPK Tim Panitia Pelaksana Kegiatan) wawancara oleh peneliti 01 juni 2018, pada jam 19.30 WIB

maka terdapat kendala yang terjadi yakni kurangnya SDM untuk pelaksanaan program seperti pembuatan desain gambar dsb, sehingga masih membutuhkan bantuan dari pihak lain yang juga sudah difasilitasi oleh pihak kecamatan, hal tersebut memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan perbaikan inrastruktur. Keterangan diatas diperkuat dengan keterangan dari bapak Taufiq yang menyatakan bahwa:

...masyarakat merasa sangat senang karena kondisi desa jadi lebih baik, yaa siapa si yang nggak senang kalau desanya diperbaiki dan fasilitas umum jadi memadai, semua masyarakat pasti senang, tapi ketika perbaikan insfrastruktur masih ada beberapa kendala yang dihadapi, contohnya pas pembuatan desain gambar untuk gedung polindes, masyarakat tidak mahir membuat desain, maka tetap minta bantuan dari pihak kecamatan, karena dikecamatan juga sudah difasilitasi tenaga ahlinya¹⁰⁰...

Terlepas dari kendala tersebut, masyarakat menikmati fasilitas infrastruktur yang sudah selsai dikerjakan melalui program PNPM. Seperti yang dikemukakan oleh ibu lilik sebagai guru TK Desa Banyutengah:

...saya kira semuanya memang bermanfaat, tapi paling utama yang saya rasakan adalah gedung TK Roudlotul Ulum itu, dulunya lokasinya campur dengan sekolah MI, MTS, MA Roudlotul Ulum jadi proses ajarmengajar tidak bisa maximal kan TK perlu ruang gerak yang bebas, dulu kalau mau nyanyi-nyanyi mengganggu murid MI, MTS, MA sekarang gedungnya sudah beda jadi lebih nyaman¹⁰¹...

.

¹⁰⁰ Taufiqurrahman (bendahara UPK) wawancara oleh peneliti 25 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB ¹⁰¹ Lilik (guru TK) wawancara oleh peneliti 29 mei 2018, pada jam 19.00 WIB

Untuk proyek lainya juga dirasa sudah tepat sasaran, masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik, hal ini akan menambah kesejahteraan masyarakat Desa Banyutengah, masyarakat harus senantiasa menjaga dan merawat hasil program agar tidak mudah rusak. Berikut tanggapan masyarakat mengenai proyek PNPM MP, ibu indah berpendapat bahwa:

...dulu kalau ada warga yang akan melahirkan harus berangkat jauh ke tetangga desa dikarenakan di Desa Banyutengah ini belum ada polindes, sekarang sudah ada sejak program PNPM MP, jadi kalau mau lahiran tidak usah jauh-jauh, kan mempermudah warga jika lahiranya pas malam hari¹⁰²...

Ditengah keberagaman persepsi masyarakat menilai setiap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang Dilaksanakan Di Desa Banyutengah, semua elemen masyarakat menyatakan bahwa pada dasarnya program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya program tersebut, diantaranya gedung TK yang sudah terpisah dari Gedung sekolah lainya sehingga proses belajar-mengajar jadi maximal, sarana kesehatan gedung polindes mempermudah masyarakat untuk memeriksakan kandungan mempermudah proses persalinan, perbaikan jalan yang mulus memperlancar sarana transportasi.

¹⁰² Indah (masy. Desa Banyutengah) wawancara oleh peneliti 28 mei 2018, pada jam 16.15 WIB

d) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Ada beberapa poin penting yang menjadi kajian utama dalam evaluasi, diantaranya: keterlibatan masyrakat dalam proyek, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan, bagaimana keberlanjutan program tersebut, dan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyrakat. Beberpa poin tersebut merupakan indikator yng diadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah.

Setelah program selesai, masyarakat masih terlibat dalam mengevaluasi atas proyek yang telah dikerjakan dari situ masyarakat akan mengetahui tingkat keberhasilan dari pembangunan tersebut, serta mengetahui rincian anggaran belanja yang terpakai dalam setiap proyek pembangunan. Berikut pendapat yang disampaikan salah satu masyarakat Desa Banyutengah, bapak Malik menyatakan bahwa:

...masyarakat tetap dilibatkan dalam proses evaluasi, begitu proyek selesai kami diundang untuk membahas evaluasinya, masyarakat mencocokan pengeluaran dengan RAB yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian masyarakat akan memberikan masukan untuk pembangunan kedepanya¹⁰³...

¹⁰³ Malik (masy. Desa Banyutengah) wawancara oleh peneliti 28 mei 2018, pada jam 19.30 WIB

Pernyataan lain muncul dari pihak perangkat desa kaur perencanaan yang membenarkan bahwa masyarakat masih dilibatkan sampai proses evaluasi. Berikut pernyataan dari bapak muzayyin:

> ...bagaimanapun juga masyarakat tetap dilibatkan, dari awal sejak proses perencanaan memang masyarakat partisipatif jadi sampai proses evaluasipun mereka tetap diundang agar program berjalan transparan¹⁰⁴...

Dalam tahap evaluasi masyarakat memiliki kontribusi dalam menyampaikan kepada pelaksana kegiatan standart pekerjaan apakah sudah sesuai dengan RAB atau adanya ketidak sesuaian dengan RAB. karena memang pekerjaanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri maka tidak menutup akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap evaluasi ini.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan merupakan terobosan bagus yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi program tersebut akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat mengenai makna dan tujuan dari program tersebut.

Perbedaan persepsi terkadang muncul ditengah pelaksanaan program, dari pihak masyarakat menginginkan hasil bangunan yang baik karena masyarakat itu sendiri yang mau menikmati

¹⁰⁴ Muzayyin (Kaur Perencanaan Desa Banyutengah) wawancara oleh peneliti, 25 mei 2018 pada jam 11:50 WIB

hasilnya, sedangkan ada sebagian pihak yang menginginkan keuntungan banyak, contohnya jika proyek tersebut diberikan kepada pemborong maka pengerjaanya tidak akan maximal. Jika hal tersebut terjadi maka itu merupakan suatu kebijakan yang menyimpang dari tujuan awal program tersebut.

Selain tidak memberikan kemandirian kepada masyarakat langkah tersebut juga dapat menutup keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat hanya bisa berpartisipasi sebagai pelaksana proyek. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Desa Banyutengah karena sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil hingga tahap evaluasi masyarakat selalu dilibatkan.

Pelaksanaan PNPM di Desa Banyutengah telah memaksimalkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat merencanakan, memimpin sebelumnya tidak pernah menyosialisasikan program seperti tugas Tim Pengelola (TPK). PNPM memang sangat memudahkan Kegiatan masyarakat untuk pelaksanaan diberikan kewenangan secara penuh kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri yang tahu kebutuhan mereka. PNPM dinilai telah sangat transparan dalam pengelolaan karena masyarakat yang menentukan maka pengawasan menjadi lebih mudah karena masyarakat tahu berapa harga bahan-bahan dsb.

Untuk itu peneliti menyatakan bahwa implementasi PNPM di Desa Banyutengah telah berhasil karena melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan dari PNPM itu sendiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Banyutengah terbukti terlaksana dengan baik hal itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, menikmati hasil dan tahap evaluasi.

B. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program PNPM MP yang secara khusus untuk perempuan salah satunya adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yaitu peminjaman dana untuk kelompok perempuan, SPP merupakan tambahan modal yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin khususnya perempuan untuk memajukan usahanya tidak boleh diberikan kepada perseorangan atau laki-laki.

Masyarakat dapat meminjam dana maksimal 15 juta perorang, dengan pembayaran 1jt 500 perbulan, dengan persyaratan yang mudah yakni 1. Harus menjadi anggota kelompok, 2. Foto copy KK dan KTP 3. Harus ada penanggung jawab. 105 Ketiga syarat dirasa sangat memudahkan masyarakat dalam peminjaman modal sehingga masyarakat dapat meminjam tanpa merasa terbebani. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Zakaria bahwa:

¹⁰⁵ Muntama'ah(ketua kelompok SPP), wawancara dilakukan oleh peneliti, 27 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB

...sudah lama saya menjadi anggota kelompok pedagang, saya senang dengan adanya program SPP ini karna persyaratan meminjam tidak ribet seperti di Bank, saya meminjam dana dari PNPM ini untuk tambahan modal jual beli kambing, alhamdulilah ketika dapat tambahan modal usaha saya semakin maju¹⁰⁶...

Dari pernyataan ibu zakaria tersebut nampak bahwa program PNPM MP ini memudahkan masyarakat dalam pinjaman modal untuk usaha, dengan begitu masyarakat dapat memulai usaha serta mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan pekerjaan masyarakat Desa Banyutengah semakin berfariasi.

Tahap partisipasi masyarakat dalam program Simpan Pinjam Perempuan

a) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini menggunakan model perencanan *Bootom up*, masyarakat akan mengadakan koordinasi atau pertemuan dengan ibu-ibu yang akan berkumpul pada salah satu rumah warga untuk membentuk sebuah kelompok, karena salah satu persyaratan untuk meminjam dana dari PNPM MP yaitu harus menjadi anggota kelompok, dalam satu kelompok minimal terdapat 5 anggota, namun tidak ada patokan maximal anggota kelompok, jadi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok akan senantiasa diterima menjadi anggota. di Desa Banyutengah ada dua kelompok yakni: kelompok Pedagang dan kelompok Sahabat, yang ingin berwirausaha maka masuk pada

-

¹⁰⁶ Zakariah(pedagang kambing) wawancara oleh peneliti, 04 juni 2018 pada jam 11:06 WIB

kelompok pedagang, Kemudian setelah penempatan anggota kelompok selesai masyarakat akan memilih ketua kelompok yang dirasa mampu untuk mengatur program PNPM MP yang berkaitan dengan Simpan Pinjam Perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Muntamaah:

...awalnya kami mengadakan perkumpulan pada salah satu rumah, kemudian kami membahas mengenai anggota kelompok sesuai dengan kepentinganya, setelah semuanya selesai kami akan mendiskusikan siapakah yang mampu untuk dijadikan sebagai ketua sekaligus penanggung jawab¹⁰⁷...

Maka, dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat terlibat secara langsung sejak tahap perencanaan serta dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang akan menghubungkan aspirasi masyarakat Desa kepada pihak kecamatan di Desa tanpa ada campur tangan dari Lembaga atau Aparat Desa.

b) Tahap pelaksanaan

Pada pelaksanaanya ada sebagian masyarakat yang tidak dapat membayar uang angsuran perbulan, Mungkin karena hasil penjualan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga pengembalian uang menjadi terhambat. jika salah satu anggota tidak dapat melunasi pembayaran maka dana selanjutnya tidak dapat dicairkan dan hal itu merugikan anggota lainya kemudian kelompok tersebut akan susah meminjam kembali pada program

¹⁰⁷ Muntamaah (ketua kelompok SPP) wawancara oleh peneliti, 27 mei 2018, pada jam 19:00 WIB

.

berikutnya karena dikhawatirkan masih mengalami hal yang sama.

Untuk menyiasati ini, kelompok tersebut diberikan tenggang waktu tambahan untuk melakukan pengembalian modal. Adapun pendapat dari salah satu anggota kelompok ibu Tatik yaitu:

...ya namanya berdagang pasti ngak selalu rame, kadang rame kadang sepi, kalau pas rame jadi punya penghasilan banyak dan nggak khawatir buat bayar cicilan pijaman PNPM MP, tapi kalau pas penjualan sepi gitu bingung mau bayarnya gimana, tapi tetap diusahakan lah, kan sudah jadi tanggung jawab peminjam¹⁰⁸...

Pernyataan tersebut merupakan kendala yang umum terjadi,
Namun hal itu tidak menjadi kendala yang begitu signifikan sehingga membuat program itu tertunda maupun terhenti, semuanya dapat teratasi dengan baik karena masyarakat senantiasa mendapat arahan dan bimbingan dari pihak UPK (Unik Pengelola Kegiatan) dari kecamatan.¹⁰⁹

Pengembalian dilakukan dalam rentang waktu 1 tahun setelah dana didapat. Sebelum mendapat ijin untuk melakukan peminjaman SPP, kelompok akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi dari Kecamatan. Bapak Taufiq selaku bendahara UPK menyatakan bahwa:

...sebelum dana turun ke Desa, saya beserta tim yang lainya selaku pihak UPK kecamatan akan melihat dan memverifikasi dulu siapa sajakah yang layak untuk

-

¹⁰⁸ Tatik hidayati (pedagang es tebu), wawancara dilakukan oleh peneliti, 26 mei 2018, pada jam 14:05 WIB

¹⁰⁹ Taufiurrahman (Bendahara UPK), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB

mendapatkkan dana pinjaman dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah disepakati dan ditetapkan pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional), agar dana yang turun tidak salah sasaran¹¹⁰...

c) Tahap Evaluasi

Seperti pada tahap perencanaan, masyarakat mengadakan suatau perkumpulan untuk membahas kendala dan hambatan apa saja yang terjadi selama proses simpan pinjam perempuan, hal itu dilakukan untuk mengetahui jika ada masalah pada salah satu anggota, perkumpulanya setelah proses pelunasan selesai. seperti yang dikatakan oleh ibu Zakaria bahwa:

...biasanya kalau pinjaman sudah lunas, diadakan perkumpulan di rumah ketua kelompok, ibu-ibu ditanya apakah ada masalah selama proses simpan pinjam ini? Kalau ada masalahnya apa bu? Apakah ada yang merasa keberatan? Yaa kira-kira begitu lah mbak, seperti ajang curhat, yang ikut berkumpul ya ibu-ibu yang berhutang saja¹¹¹...

Dengan diadakan tahap evaluasi, anggota kelompok simpan pinjam perempuan dapat meningkatkan mutu program, memberikan justifikasi atau penggunaan sember-sumber yang ada dalam kegiatan, memberikan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan.

Menurut Suprihanto Tujuan evaluasi antara lain: a) sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan

-

¹¹⁰ Taufiurrahman (Bendahara UPK), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB

¹¹¹ Zakariah (pedagang kambing) wawancara oleh peneliti 04 juni 2018 pada jam 11:06 WIB

datang b) untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen saat ini serta dimasa yang akan datang c) memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus-menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan.

Kendala utama pada masyarakat Desa Banyutengah yaitu tidak ada waktu dan rasa tidak percaya diri masyarakat yang merasa mereka tidak mampu terlibat dan berkontribusi dalam tahapan pembuatan rencana strategis pembangunan. Masyarakat tidak memiliki waktu dikarenakan mereka memiliki tanggungjawab untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan rasa tidak percaya diri masyarakat disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat karena mayoritas hanya lulusan sekolah dasar (SD), bahkan masyarakat yang saat ini berusia diatas lima puluh tahun sebagian besar tidak lulus sekolah dasar. Karena itulah masyarakat memilih tidak berpartisipasi. Namun untuk selebihnya partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik, kelemahanya hanya ada pada proses perencanaan.

Masyarakat senang sekali dengan adanya Program kebijakan pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Pedesaan ini, karena sudah sejalan dengan tujuan utama PNPM MP

¹¹² Suprihanto, *Manajemen Personalia* (Yogjakarta:BPFE,1988)hal 54

yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. program ini mampu membuat masyarakat berusaha lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya. PNPM mandiri berhasil menciptakan masyarakat yang kritis dalam proses formulasi penetapan sebuah program, kemudian masyarakat senantiasa melakukan gotong royong dalam perbaikan infrastruktur dan dalam kegiatan-kegiatan lainya, masyarakat memiliki tanggung jawab besar yang terlihat dari keseriusanya dalam proses pengelolaan. hal itulah yang membedakan antara program pemerintah lain dengan PNPM Mandiri Pedesaan. Point penting dalam PNPM MP ini memang ditekankan pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan partisipasi masyarakat Desa Banyutengah yang antusiasme keterlibatan masyarakatnya dalam tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukan bahwa masyarakat sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PNPM MP maka ada dampak yang dirasakan dari proses partisipasi tersebut yakni pada bidang kesejahteraan, dengan adanya program PNPM MP pada infrastruktur masyarakat merasa senang dan diuntungkan karena pada prosesnya selalu ada pendampingan dari pihak kecamatan maka kalaupun ada kendala bisa ditangani dengan baik. Hasil dari pembangunan juga berkualitas baik karena masyarakat sendiri yang mengerjakan tanpa dialihkan kepada pemborong yang cenderung mencari keuntungan saja.

Selain itu pada program PNPM MP lainya yang murni beranggotakan perempuan juga dirasa sangat membantu masyarakat miskin yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal, dengan adanya kedua program yakni pembangunan infrastruktur dan Simpan Pinjam Perempuan ini dirasa sudah seimbang.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis dan membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Banyutengah tahun 2007 yakni tahun sebelum adanya PNPM MP dan tahun 2015 setelah adanya PNPM MP melalui data yang didapatkan dari BPS, Adapun tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan yang memiliki indikator masing-masing.

Adapun indikator dari tahapan tingkat kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

1. Tahapan Kelua<mark>rg</mark>a Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (develomental needs) dari keluarga.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus¹¹³.

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

-

¹¹³ BPS/Batasan dan Pengertian MDK _ MDK sejahtera.html diakses pada tanggal 24 juli 2018, pada jam 08:45 WIB

- Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
- 6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- 3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah.
- Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- 6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7. Seluruh anggota keluarga umur 10 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (develomental needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

Dua indikator Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) dari 21 indikator keluarga, yaitu:

- Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.¹¹⁴

 114 BPS/Batasan dan Pengertian MDK $_$ MDK sejahtera.html diakses pada tanggal 24 juli 2018, pada jam 08:45 WIB

Tabel 4.3

Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera di Desa Banyutengah Tahun

2007 (sebelum adanya PNPM di Desa Banyutengah) dan Tahun 2015

(setelah adanya PNPM di Desa Banyutengah)¹¹⁵

NO	Tahun 2007	Tahun 2015
1.	Pra sejahtera: 148 orang	Pra sejahtera: 115 orang
2.	Sejahtera I : 171 orang	Sejahtera I : 154 orang
3.	Sejahtera II : 262 orang	Sejahtera II : 286 orang
4.	Sejahtera III : 96 orang	Sejahtera III: 256 orang
5.	Sejahtera III plus : 1 orang	Sejahtera III plus : 12 orang

Sumber : Data BPS Juml<mark>ah</mark> Keluar<mark>ga Tahap</mark>an Sej<mark>aht</mark>era di Desa Banyutengah Tahun 2007 dan Tahun 2015

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa Pada tingkat (*pra sejahtera*)

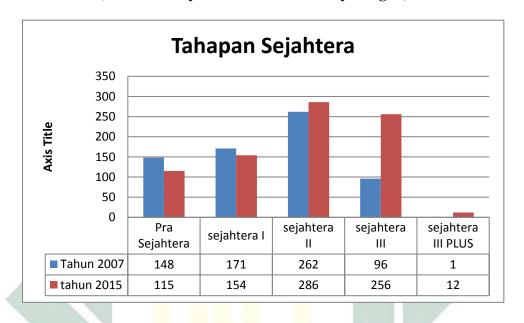
Pada tahun 2007 masyarakat desa Banyutengah ada **148** keluarga dan pada tahun 2015 ada **115** keluarga terdapat penurunan, pada tingkat (*sejahtera II*) tahun 2007 ada **171** keluarga dan **154** keluarga ditahun 2015 terdapat penurunan, tingkat (*sejahtera II*) tahun 2007 ada **262** keluarga dan **286** keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan, tingkat (*sejahtera III*) tahun 2007 ada **96** keluarga dan **256** keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan, tingkat (*sejahtera III* plus) tahun 2007 ada **1** keluarga dan **12** keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹⁵https://gresikkab.bps.go.id *Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera di Desa Banyutengah* Tahun 2007 dan Tahun 2015 diakses pada tgl 24 juli 2018, pada jam 08:07 WIB

Diagram 4.9

Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera di Desa Banyutengah Tahun 2007 (sebelum adanya PNPM di Desa Banyutengah) dan Tahun 2015 (setelah adanya PNPM di Desa Banyutengah)¹¹⁶



Sumber: Data BPS Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera di Desa Banyutengah Tahun 2007 dan Tahun 2015

Dari data diatas menunjukkan bahwa terjadi pergerakan tingkat kesejahteraan antara tahun 2007 ke 2015. Maka implementasi kebijakan PNPM di Desa Banyutengah dapat dikatakan efektif karena dapat menggerakkan tahapan keluarga ketingkat yang lebih tinggi.

2. Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Peneliti akan memberikan gambaran mengenai perekonomian masyarakat yang mendapatkan dana Simpan Pinjam Perempuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹⁶https://gresikkab.bps.go.id *Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera di Desa Banyutengah* Tahun 2007 dan Tahun 2015 diakses pada tgl 24 juli 2018, pada jam 08:07 WIB

membandingkan sebelum mendapatkan dana pinjaman dan setelah mendapatkan dana pinjaman dari program Simpan Pinjam Perempuan.

Deskripsi Pendapatan Masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik:

a. Sebelum Adanya Program PNPM Mandiri Pedesaan

Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009 ada 168 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2010 ada 105 orang dari jumlah penduduk 2998, th 2011 ada 128 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2012 ada 125 orang dari jumlah penduduk 3.190, th 2013 ada 115 orang dari jumlah penduduk 3.230, th 2014 ada 115 orang dari jumlah penduduk 3.331, tahun 2015 ada 102 orang dari jumlah penduduk 3.298.

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 ke th 2010 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 63 orang, hal itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang berkurang sebesar 67 orang. pada tahun 2010 ke th 2011 terdapat peningkatan pengangguran sebesar 23 orang, namun hal itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga meningkat/bertambah dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 67 orang, pada tahun 2011 ke 2012 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 3 orang, dan terdapat jumlah penduduk yang juga meningkat/bertambah dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 125 orang. pada tahun 2012 ke 2013 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 10 orang, hal itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang berkurang sebesar 40 orang. Pada tahun 2013 ke 2014 terdapat persamaan pada angka pengangguran, namun terdapat penambahan 101 orang pada jumlah penduduk. Pada tahun 2014 ke 2015 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 13 orang, dan terdapat pertambahan penduduk sebesar 33 orang¹¹⁷.

Artinya jika angka pengangguran menurun juga perlu dilihat jumlah penduduknya, jika penduduknya naik bisa jadi angka pengangguran juga ikut naik, jika jumlah penduduknya turun bisa jadi angka pengangguran ikut turun, namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat persamaan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya karena hal itu dipengaruhi oleh lapangan pekerjaan yang sempit dan daya saing yang tinggi.

Terkait jumlah penduduk yang naik turun dikarenakan bebrapa faktor yaitu: adanya angka kelahiran, adanya angka kematian, dan migrasi penduduk Desa Banyutengah menikah dengan penduduk lain dan berpindah, begitupun sebaliknya.

Pendapatan masyarakat Desa Banyutengah sebelum adanya PNPM MP yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka inginkan, mengingat mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, jumlah petani selalu saja

٠

¹¹⁷ Arsip desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009-2015

tertinggi dan diminati oleh masyarakat Desa Banyutengah, pada tahun 2009 ada 1338 masyarakat, th 2010 ada 1275 masyarakat, th 2011 ada 1285 masyarakat, th 2012 ada 1314 masyarakat, th 2013 ada 1310 masyarakat, th 2014 ada 1325 masyarakat, th 2015 ada 1315¹¹⁸ masyarakat yang bermata pencaharan sebagai petani.

Terlepas dari jumlah petani diatas tentu saja terdapat kendala-kendala yang tidak dapat dipungkiri ketika bertani, antara lain: disebabkan karena adanya keterbatasan modal, memiliki lahan yang tidak luas, harga jual hasil panen rendah, serta tenaga kerja yang kurang profesional dalam pengelolaan¹¹⁹. Pernyataan dari bapak Khoirul bahwa:

...jadi petani itu gampang-gampang susah mbak, kalau waktunya panen dan hasilnya banyak ya seneng, kalau pas panen dan hasilnya sedikit itu yang bikin kecewa, kadang hasilnya sedikit itu karna dimakan wereng, mau dikasih obat biar tidak dimakan wereng ya gak ada modalnya jadi ya bagaimana¹²⁰...

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Yaumi:

...kalau waktunya menanam padi ya menanam padi disawah, kalau waktunya menanam jagung ya lahanya ditanami jagung, kadang saya tanami kacang tanah juga, kalau musimnya panas kan butuh pengairan banyak mbak dan itu butuh uang banyak untuk dessel, kalau waktunya panen juga butuh kuli untuk membantu proses panen, tapi kadang hasil yang didapat dengan modal yang dikeluarkan tidak seimbang, kadang rugi banyak, kadang untung

_

¹¹⁸ Arsip desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009-2015

 $^{^{119}}$ Fandholi (Kepala Desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 10:15 WIB

¹²⁰ Khoirul (petani), wawancara oleh peneliti 05 juni 2018, pada jam 19.00 WIB

banyak ya disyukuri saja, pas ada program simpan pinjam itu saya ikut pinjam untuk modal membeli bibit, bayar buruh, bayar sewa traktor dan lainlain¹²¹...

Harapan masyarakat sebenarnya ingin memperoleh pendapatan setinggi-tingginya namun pada kenyataanya banyak keterbatasan yang mereka miliki. Jika dilihat dari segi permodalan, petani yang memiliki modal lebih banyak otomatis berbeda pendapatanya dengan petani yang kekurangan modal. Maka ibu yaumi meminjam dana dari PNPM MP sebagai tambahan modal untuk pertanian.

Namun, sebagian masyarakat beranggapan bahwa sedikit atau banyaknya modal yang dimiliki tergantung bagaimana cara mengelola modal atau luas lahan yang dimilikinya. Semakin baik cara pengelolaan petani maka otomatis hasilnya juga akan maksimal sehingga pendapatanya juga akan meningkat. Namun pada hal ini masyarakat Desa Banyutengah memiliki permasalahan pada produktivitas yang rendah, yang disebabkan oleh tingkat ketrampilan masyarakat yang belum mumpuni sehingga memicu hasil pada pendapatan masyarakat.

Kemudian selain sebagai petani, masyarakat juga sebagian bekerja sebagai guru swasta. pada tahun 2009 ada 390 masyarakat, 2010 ada 377 masyarakat, th 2011 ada 398 masyarakat, th 2012 ada 442 masyarakat, th 2013 ada 427 masyarakat, th 2014 ada 437

.

¹²¹ Yaumi (petani), wawancara oleh peneliti 06 juni 2018, pada jam 19.00 WIB

masyarakat, th 2015 ada 437¹²² masyarakat yang menjadi guru swasta dengan gaji rendah, hal itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari guru tersebut, karena dulu tidak ada peraturan yang mensyaratan pendidikan terakhir minimal S1 maka, mudah sekali masyarakat menjadi guru meskipun hanya lulusan MA Sederajat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ibu Husniah selaku guru MI dan MTS Roudlutul ulum.:

...saya jadi guru sudah lama, dulu tidak ada peraturan harus lulus S1, tapi seiring berjalanya waktu perarturan tersebut diadakan pemerintah, maka guru yang dulu belum S1 berbondong-bondong kuliah lagi disambi tetap mengajar murid-murid, kalau ditanya gaji si tidak seberapa mbak, kan saya guru swasta¹²³...

Hal itu menunjukan bahwa meskipun profesi masyarakat sebagai guru namun gajinya belum tentu cukup, karena hanya guru swasta.

Urutan ketiga dari mata pencaharaian penduduk yang banyak ditekuni oleh masyarakat Desa Banyutengah yakni sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Pada tahun 2009 ada 425 masyarakat, th 2010 ada 357 masyarakat, th 2011 ada 350 masyarakat, th 2012 ada 350 masyarakat, th 2013 ada 341 masyarakat, 2014 ada 320 masyarakat, th 2015 ada 320 masyarakat. Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 ke tahun 2010 terdapat penurunan angka sebesar 68, pada tahun 2010

¹²² Arsip desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009-2015

¹²³ Husniah (guru swasta), wawancara oleh peneliti, 03 Juni 2018, pada jam 19.10 WIB

ke 2011 terdapat penurunan angka sebesar 7, pada tahun 2011 ke 2012 angka tetap tidak terdapat penurunan, pada tahun 2012 ke 2013 terdapat penurunan angka sebesar 9, pada tahun 2013 ke 2014 terdapat penurunan angka sebesar 21, pada tahun 2014 ke 2015 angka tetap tidak terdapat penurunan 124. Dari pergerakan angka tersebut diketahui bahwa Tenaga Kerja Indonesia cenderung mengalami penurunan meskipun angkanya tidak terlalu signiikan. Artinya dari pergerakan tersebut masyakat mulai berganti profesi dari TKI ke profesi lainya.

Ada beberapa faktor yang memicu mayarakat untuk bekerja keluar negeri antara lain: tidak ada pekerjaan di lingkunganya yang sesuai kemampuan dengan pendapatan yang baik untuk mengangkat perekonomian keluarga. Memiliki tanggungan beban yang cukup berat untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah mendesak. Pendapatan suami tidak pasti, keinginan memiliki rumah yang layak huni, tidak memiliki lahan/sawah untuk ditanami, adanya iming-iming dari teman atau kerabat bahwa TKI mendapatkan gaji tinggi, memperoleh pengalaman baru dinegara yang dituju, melihat keberhasilan teman atau tetangga yang sukses bekerja di Luar Negri. 125 Seperti yang diungkapkan oleh ibu Tatik selaku mantan TKI Malaysia:

-

¹²⁴ Arsip desa, Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009-2015

¹²⁵ Tatik Hidayati(pedagang es tebu), wawancara oleh peneliti, 26 mei 2018, pada jam 14:05 WIB

...saya cumak 3 tahun menjadi TKI di Malaysia dulu saya memutuskan untuk pergi kerja ke malaysia itu dikarenakan ingin merubah kehidupan keluarga saya, saya pikir ketika pergi kesana akan dapat gaji yang besar, namun kenyataan tidak sesuai dengan bayangan, jika di Malaysia tidak memiliki surat perijinan untuk bekerja maka akan menjadi buronan polisi, kan tidak nyaman rasanya hidup dinegara orang tapi dikejar terus sama polisi¹²⁶...

Pernyataan serupa diungkapkan oleh bapak misnan TKI Malaysia:

...sudah lama sekali saya bekerja di Malaysia, sebelum saya menikah sampai anak saya sekarang sudah berumur 22 tahun, sekitar 30 tahunan lah yaa merantau di Malaysia kalau sedang bernasib baik ya menyenangkan pastinya dapat uang banyak, tapi kalau sedang bernasib kurang baik nelangsa sekali rasanya kerja panas-panas, kehujanan, kerja diatas bangunan tinggi 50 lantai tapi gajinya dibawah kabur oleh bosnya, kan nelangsa, tidak bisa kirim uang keluarga dirumah 127...

Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi daya tarik tersendiri oleh sebagian masyarakat Desa Banyutengah untuk bekerja sebagai TKI ke Luar Negri meskipun tidak mudah hidup di Negara lain namun masih banyak diminati oleh sebagian masyarakat Banyutengah terlebih lagi yang masih berusia sekitar 20 tahunan, karena mereka bimbang setelah lulus sekolah tidak memiliki pekerjaan, meskipun berangkat ke Luar Negri hanya bermodalkan tekad yang kuat.

b. Sesudah Adanya Program PNPM Mandiri Pedesaan

-

¹²⁶ Ibid pada jam 14:20 WIB

¹²⁷ Misnan (TKI), wawancara oleh peneliti, 03 juni 2018, pada jam 15.00 WIB

Dari penjelasan diatas. dapat diketahui bahwa Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah Jika dikaitkan dengan PNPM MP dari tahun 2009 sampai tahun 2015 dapat dikatakan **PNPM** bahwa MP mengurangi dapat angka pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah, meskipun angka yang berkurang tidak begitu signifikan namun tetap ada pergerakan angka dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2013 ke tahun 2014 yang angka pengangguran masih tetap.

Pendapatan masyarakat sesudah adanya PNPM mandiri tentu saja terdapat perubahan, salah satu contoh pendapatan informan kunci melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ibu Tatik selaku informan mengatakan bahwa:

...saat ini saya memiliki pendapatan yang tetap, dulu saya di malaysia bekerja di rumah sakit, kemudian saya kembali ke indonesia saja nggak kerasan disana, pengenya buka usaha di rumah tapi namanya usaha kan butuh modal, lah itu yang jadi keresahan saya, tapi pas ada PNPM MP itu saya pinjam modal 10 jt untuk buka usaha¹²⁸...

Sebelumnya bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 3 tahun, kemudian kembali ke Negara Indonesia karna kerja di negara orang tidak mudah, apalagi kalau tidak memiliki dokumen resmi yang diwajibkan oleh negara sebagai persyaratan untuk menjadi TKI, maka beliau kembali ke Indonesia dengan rencana membuka usaha sendiri di rumah, namun karna terkendala modal

_

¹²⁸ Tatik hidayati (pedagang es tebu), wawancara oleh peneliti pada tgl 21 juli 2018, pada jam 10.15 WIB

rencana tersebut tidak terlaksana, kemudian ketika ada PNPM MP beliau mulai meminjam dana yang digunakan sebagai modal untuk berjualan es tebu di depan rumahnya, dan saat ini pendapatan yang diperoleh beliau dari hasil berjualan es tebu minimal kurang lebih 5jt rupiah. Berikut pernyataanya:

...seneng gitu bisa pinjam modal ke PNPM MP, nggak pakek ribet syarat ini itu, tinggal setor KTP dan KK langsung cair, dulu kalau tidak dapat pinjaman dari PNPM mungkin sampai sekarang saya tidak dapat penghasilan, alhamdulilahnya sekarang penghasilan saya kurang lebih 5Jt perbulan dari hasil berjualan es tebu, tapi itu masih itung-itungan kotor, belum dikurangi buat beli plastik, tebu dll... 129

Hal serupa juga diungkapankan oleh ibu siti zakariah selaku anggota Simpan Pinjam Perempuan yang berprofesi sebagai penjual kambing:

...kambing itu diberi makan setiap hari, saya selalu beli pakan kambing berkualitas baik, terkadang saya kasih vitamin juga agar kambingnya tetep sehat, untuk membeli pakan kambing kan butuh uang, sedangkan penjualan terkadang tidak ada sama sekali, mangkanya saya tetap pinjam modal dari PNPM MP biar ada modal untuk beli pakan kambing, untuk pembayaranya saya menggunakan uang hasil penjualan. kalau kambingnya sehat, gemuk itu untungnya banyak bisa 2jt perkambing, mangkanya saya kasih makananya tidak sembarangan¹³⁰...

Dengan hasil wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa Dampak PNPM MP pada masyarakat Desa Banyutengah jika dilihat dari segi Sosial-Ekonomi adalah: Ekonomi:

¹²⁹ Tatik hidayati (pedagang es tebu) wawancara oleh peneliti 03 juni 2018 pada jam 11.05 WIB

¹³⁰ Zakariah (pedagang kambing) wawancara oleh peneliti 04 juni 2018 pada jam 12:36 WIB

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa, peningkatan penghasilan perbulan antara sebelum dengan sesudah adanya PNPM MP bahkan dari yang tidak memiliki penghasilan perbulan sebelum adanya PNPM MP berubah mendapatkan penghasilan perbulan setelah adanya PNPM MP, melalui usaha-usaha kecil masyarakat Desa Banyutengah dari penjual es tebu, berdagang kambing, berdagang krudung dan untuk modal usaha lainya. Sosial: jika implementasi kebijakan itu dilihat dari partisipasi masyarakat, maka dapat dikatakan baik karena partisipasi masyarakat antusias dari proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi selalu terlibat. Hal itulah yang dikatakan sebagai upaya pemmberdayan masyarakat melalui gotong royong, menggali kreatifitas masyarakat dll.

Dengan hasil penelitian diatas maka masyarakat Desa Banyutengah dapat dikatakan bahwa partisipasinya tergolong Partisipasi Mandiri karena Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan yang terpenting, masyarakat juga memegang kandali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM MP pada masyarakat Desa Banyutengah

Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah dianalisis menggunakan Teori Kebijakan antara lain seperti ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Mengenai aktor-aktor yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi dianalisis menggunakan Teori Implementasi dari Merile S. Grindle dilihat melalui dua variabel yakni: isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan salah satu indikator dari isi kebijakan tersebut dapat dikatakan implementasi berhasil atau tidak dilihat melalu Perubahan yang diinginkan dari program PNPM MP pada wilayah Desa Banyutengah, karena memang tahap dari teori diatas sudah terpenuhi dengan baik maka dapat dikatakan bahwa implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Baik.

Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan Teori dari Uphoff, Cohen Dan Goldmith yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Dengan masyarakat Desa Banyutengah dapat dikatakan bahwa partisipasinya tergolong *Partisipasi*

Mandiri karena Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan yang terpenting, masyarakat juga memegang kandali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan.

Banyutengah Tahun 2007 sebelum adanya PNPM MP dan Tahun 2015 setelah adanya PNPM MP Pada tingkat (pra sejahtera) Pada tahun 2007 masyarakat desa Banyutengah ada 148 keluarga dan pada tahun 2015 ada 115 keluarga terdapat penurunan, pada tingkat (sejahtera I) tahun 2007 ada 171 keluarga dan 154 keluarga ditahun 2015 terdapat penurunan, tingkat (sejahtera II) tahun 2007 ada 262 keluarga dan 286 keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan, tingkat (sejahtera III) tahun 2007 ada 96 keluarga dan 256 keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan, tingkat (sejahtera III plus) tahun 2007 ada 1 keluarga dan 12 keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan. Dari data diatas menunjukkan bahwa terjadi pergerakan tingkat kesejahteraan antara tahun 2007 ke 2015.

Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009 ada 168 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2010 ada 105 orang dari jumlah penduduk 2998, th 2011 ada 128 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2012 ada 125 orang dari jumlah penduduk 3.190, th 2013 ada

115 orang dari jumlah penduduk 3.230, th 2014 ada 115 orang dari jumlah penduduk 3.331, tahun 2015 ada 102 orang dari jumlah penduduk 3.298.

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 ke th 2010 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 63 orang, hal itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang berkurang sebesar 67 orang. pada tahun 2010 ke th 2011 terdapat peningkatan pengangguran sebesar 23 orang, namun hal itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga meningkat/bertambah dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 67 orang, pada tahun 2011 ke 2012 terdapat penurunan angka pengangguran dan terdapat jumlah penduduk yang juga sebesar 3 orang, meningkat/bertambah dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 125 orang. pada tahun 2012 ke 2013 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 10 orang, hal itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang berkurang sebesar 40 orang. Pada tahun 2013 ke 2014 terdapat persamaan pada angka pengangguran, namun terdapat penambahan 101 orang pada jumlah penduduk. Pada tahun 2014 ke 2015 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 13 orang, dan terdapat pertambahan penduduk sebesar 33 orang.

Artinya jika angka pengangguran menurun juga perlu dilihat jumlah penduduknya, jika penduduknya naik bisa jadi angka pengangguran juga ikut naik, jika jumlah penduduknya turun bisa jadi angka pengangguran ikut turun, namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat persamaan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya karena hal

itu dipengaruhi oleh lapangan pekerjaan yang sempit dan daya saing yang tinggi.

Terkait jumlah penduduk yang naik turun dikarenakan beberapa faktor yaitu: adanya angka kelahiran, adanya angka kematian, dan migrasi penduduk Desa Banyutengah menikah dengan penduduk lain dan berpindah, begitupun sebaliknya. Maka implementasi kebijakan PNPM di Desa Banyutengah dapat dikatakan efektif karena dapat menggerakkan tahapan keluarga ketingkat yang lebih tinggi.

2. Dampak PNPM MP pada masyarakat Desa Banyutengah jika dilihat dari segi Sosial-Ekonomi adalah :

Dampak PNPM MP pada masyarakat Desa Banyutengah jika dilihat dari segi Sosial-Ekonomi adalah: Ekonomi: Pergerakan pada angka Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah Jika dikaitkan dengan PNPM MP dari tahun 2009 sampai tahun 2015 dapat dikatakan bahwa PNPM MP dapat mengurangi angka pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah, meskipun angka yang berkurang tidak begitu signifikan namun tetap ada pergerakan angka dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2013 ke tahun 2014 yang angka pengangguran masih tetap, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan kerja bagi peningkatan penghasilan perbulan antara sebelum masyarakat desa, dengan sesudah adanya PNPM MP bahkan dari yang tidak memiliki penghasilan perbulan sebelum adanya PNPM MP berubah mendapatkan penghasilan perbulan setelah adanya PNPM MP, melalui usaha-usaha kecil masyarakat Desa Banyutengah dari penjual es tebu, berdagang kambing, berdagang krudung dan untuk modal usaha lainya.

Sosial: jika implementasi kebijakan itu dilihat dari partisipasi masyarakat, maka dapat dikatakan baik karena partisipasi masyarakat antusias dari proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi selalu terlibat. Hal itulah yang dikatakan sebagai upaya pemmberdayan masyarakat melalui gotong royong, menggali kreatifitas masyarakat dll.

B. Saran

Ada beberapa anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang tidak bisa melanjutkan pinjaman dikarena tunggakan hal itu dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah hasil penjualan yang sedikit sehingga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, maka tidak mnutup kemungkinan terjadi kelalaian dan penylewengan jika tidak ada pendampingan dan pengawasan dari pihak UPK. Sebaiknya pihak UPK senantiasa mendampingi demi kelancaran program serta masyarakat diharapkan tidak lalai dalam proses pengembalian modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Dr *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal* (Depok:Alta Utama, 2017)
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, edisi kedua. (jakarta:PT Bumi aksara, 2008)
- Abdul, Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Ade Zaputro, Wismoyo Skripsi "Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, SKRIPSI Jurusan, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2015
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan* aplikasi). (Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2011)
- Anshori (masy. Desa Banyutengah) wawancara dilakukan oleh peneliti, 2 juni 2018, pada jam 19:30 WIB
- Arsip Desa, Data jenis pekerjaan masyarakat Desa Banyutengah tahun 2009-2015
- BPS/Batasan dan Pengertian MDK _ MDK sejahtera.html
- Bungin, Burhan, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format

 Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik,

- Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013)
- Darmansyah, Marco "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2014" SKRIPSI Jurusan Pembangunan Wilayah, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PTO (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan)
- Fandholi (Kepala Desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 25 Mei 2018, pada jam 10:15 WIB
- Grindle, Merilee S, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, (new jersey: Princetown University Press, 1980)
- Gusti Putu Putra, "Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung "TESIS, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta:Salemba Humanika, 2012)
- Hidayat, Sarif "Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Kehidupan

Masyarakat(Studi Kasus Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)" SKRIPSI Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html4

https://gresikkab.bps.go.id *Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera di Desa Banyutengah* Tahun 2007 dan Tahun 2015

Husniah (guru swasta), wawancara oleh peneliti, 03 Juni 2018, pada jam 14.10
WIB

Ilham (masy desa Banyutengah), wawancara dilakukan oleh peneliti, 04 juni 2018, pada jam 15:15 WIB

Indah (masy. Desa Banyutengah) wawancara oleh peneliti 28 mei 2018, pada jam 16.15 WIB

Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Khoirul (petani), wawancara oleh peneliti 05 juni 2018,

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2007)

Lilik (guru TK) wawancara oleh peneliti 29 mei 2018

- Litaniawan Fedrik, Suasa "Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kecamatan Torue Kabupatenparigi Moutong" Jurnal Academica Fisip Untad Vol.06 No. 01 Februari 2014
- M Ubaidillah, Hasan, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014)
- Malik (masy. Desa Banyutengah) wawancara oleh peneliti 28 mei 2018, pada jam 19.30 WIB
- Mardikanto totok, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*, (Bandung:ALFABETA, 2017)
- Misnan (TKI), wawancara oleh peneliti, 03 juni 2018
- Munif (Masy. Desa Banyutengah) wawancara dilakukan oleh peneliti, 03 juni 2018, pada jam 15:15 WIB
- Muntama'ah (ketua kelompok SPP), wawancara dilakukan oleh peneliti, 27 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB
- Muntamaah (ketua kelompok SPP) wawancara oleh peneliti, 27 mei 2018, pada jam 19:00 WIB
- Muzayyin (Kaur Perencanaan Desa Banyutengah) wawancara oleh peneliti, 25 mei 2018 pada jam 11:50 WIB
- Parsons wayne *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (jakarta:Prenadamedia Grup,2005)

- Rekapitulasi Pendanaan BLM PNPM-MP Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
 Tahun Anggaran 2009-2014
- Riant Nugroho, *Public Policy Teori kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijkan* (Jakarta:PT GRAMEDIA,2008)
- S. Nasution, sosiologi pendidikan (jakarta:Bumi Aksara,2010)
- Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996)
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahanya*, cetakan kedua (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
- Soetrisno loekman, *menuju masyarakat partisipatif* (yogyakarta:kanisius, 1995)
- Subiakto Henry, *Komunikasi Politik-Media dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2014)
- Sugandi, Yogi Suprayogi, Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu
 Di Indonesia (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi-Mixed Methode* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)
- Suprihanto, Manajemen Personalia (Yogjakarta:BPFE,1988)

tahun 2015-2009

Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 1988)

- Tatik hidayati (pedagang es tebu) wawancara oleh peneliti 03 juni 2018 pada jam 11.05 WIB
- Tatik hidayati (pedagang es tebu), wawancara dilakukan oleh peneliti, 26 mei 2018, pada jam 14:05 WIB
- Tatik hidayati (pedagang es tebu), wawancara oleh peneliti pada tgl 21 juli 2018, pada jam 10.15 WIB
- Taufiqurrahman (bendahara UPK) wawancara oleh peneliti 25 Mei 2018, pada jam 20:00 WIB
- Toni (TPK Tim Panitia Pelaksana Kegiatan) wawancara oleh peneliti 01 juni 2018, pada jam 19.30 WIB
- Yaumi (petani), wawancara oleh peneliti 06 juni 2018, pada jam 19.00 WIB
- Zakariah (pedagang kambing) wawancara oleh peneliti 04 juni 2018 pada jam 11:06 WIB